

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISA PENGARUH RETRIBUSI PERIKANAN
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN
DI KABUPATEN BELITUNG**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu kelautan
Bidang Minat Manajemen Perikanan

Disusun Oleh :

FIRDAUS IDHAMSYAH
NIM. 015584311

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN PERIKANAN**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisa Pengaruh Retribusi Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Belitung adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 15 Desember 2011

METERAI
TEMPEL
Pajak Penghasilan
TGL.
CD668AAF643182598
Rp 6000
Menyatakan



(Firdaus Idhamsyah)
NIM. 015584311

ABSTRAK**Analisa Pengaruh Retribusi Perikanan terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Belitung****Firdaus Idhamsyah****Universitas Terbuka****f_idhamsyah@ymail.com**

Kata kunci: retribusi, pengelolaan sumberdaya kelautan, sosial ekonomi masyarakat nelayan

Kabupaten Belitung merupakan kawasan kepulauan dengan kondisi perairan laut yang kaya akan potensi perikanan dan kelautan. Berdasarkan data, jumlah nelayan 9.455 orang, jumlah armada penangkapan sebanyak 2.561 buah dengan jenis alat tangkap yang dominan yaitu pancing, jaring kepiting, bubu ikan, bubu kepiting, jaring insang dan bagan perahu. Sedangkan produksi perikanan mencapai jumlah 42.501 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung, 2010). Sementara itu, pengembangan usaha perikanan tangkap, khususnya skala kecil terkendala oleh adanya penguatan-penguatan yang dibebankan kepada nelayan, keterbatasan kemampuan dalam mengakses sumberdaya, permodalan, teknologi, informasi maupun pemasaran hasil perikanan. Kondisi demikian telah mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan penghapusan retribusi dan pungutan perikanan sebagaimana Surat Edaran (SE) Menteri Kelautan dan Perikanan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Oleh sebab itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi ekonomi dan sosial nelayan di Kabupaten Belitung, menganalisis pengaruh retribusi perikanan terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kabupaten Belitung, dan mengidentifikasi faktor yang berperan dalam peningkatan pendapatan nelayan di Kabupaten Belitung.

Penelitian ini adalah penelitian survai dengan pendekatan eksplanatif yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa dengan pendekatan kuantitatif. Sementara itu, penentuan sampel menggunakan sampling kelompok terhadap populasi, teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampel acak sederhana (*Simple random sampling*) sehingga diperoleh 100 nelayan di Kabupaten Belitung sebagai responden.

Hasil yang diperoleh berdasarkan uji beda dua rata-rata menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan rata-rata nelayan di Kabupaten Belitung sebelum dan sesudah penghapusan retribusi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada pendapatan rata-rata nelayan baik sesudah maupun sebelum penghapusan retribusi.

ABSTRACT**Analysis Effect of Retribution Fisheries Against Improvement Fisherman Income in Belitung Regency****Firdaus Idhamsyah****Universitas Terbuka****f idhamsyah@ymail.com**

Key words: retribution, the management of marine resources, socioeconomic conditions fishing.

Belitung Regency is an archipelago area with conditions that are rich in marine waters and marine fishery potential. Based on 9455 data on the number of people fishing, the fishing fleet as much as 2561 pieces with a dominant type of fishing gear that is fishing rods, crab nets, fish traps, crab traps, gill nets and boats chart. whereas the amount of fishery production reached 42,501 tons (Department of Marine and Fisheries Belitung Regency, 2010). Meanwhile, business development, especially small-scale fisheries is constrained by the existence of reinforcement-strengthening of the Retribution to the fishermen, limited ability to access resources, capital, technology, information and marketing of fishery products. Demikan conditions have resulted in low levels of income and welfare of fishermen. One effort to overcome these problems is the elimination of user fees and Fisheries Retribution Circular (SE) The Minister of Maritime Affairs and Fisheries to all Governors and Regents / Mayors throughout Indonesia.

Therefore, the study aims to describe the economic and social conditions of fishermen in the Belitung Regency, analyzing the effect of increasing the income levy on fishermen fishing in the Belitung Regency, and identifies factors that contribute to increasing the income of fishermen in Belitung Regency.

This study is a survey research with explanative approach which describes the causal relationships between variables through the testing of hypotheses with quantitative approach. Meanwhile, the determination of the sample using a sampling group of population, sampling techniques using simple random sampling method Simple random sampling in order to obtain the number of samples in this study of 100 respondents, of which the sample is the fishermen in the Belitung Regency.

The results obtained by two different test average shows that there is no proven significant effect between the average income of fishermen in Belitung Regency before and after the removal of levies which can also be explained that there is no difference in average income of fishermen either after or before removal of retribution.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

Judul TAPM : Analisa Pengaruh Retribusi Perikanan Terhadap
Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kabupaten
Belitung

NAMA : Firdaus Idhamsyah

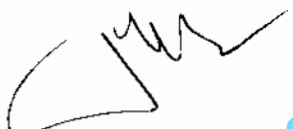
NIM : 015584311


PROGRAM STUDI : Magister Manajemen Perikanan

Menyetujui :

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. Sugeng Hari Wisudo, M.Sc

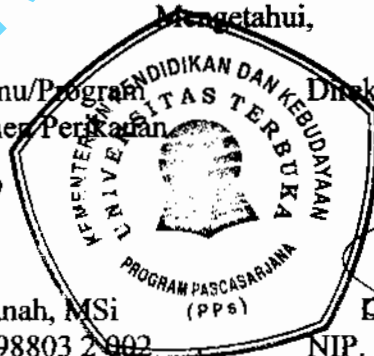

Dr. Nuraini Soleiman, M.Ed

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Manajemen Perikanan
Direktur Program Pascasarjana


Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si
NIP. 19631111 198803 2 002


Dr. Sueiati, M.Sc, Ph.D
NIP. 195220213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERIKANAN**

PENGESAHAN

Nama : Firdaus Idhamsyah
 NIM : 015 584 311
 Program Studi : Manajemen Perikanan
 Judul TAPM : Analisa Pengaruh Retribusi Perikanan Terhadap
 Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Belitung

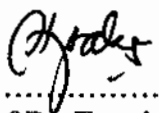
Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pascasarjana, Program Studi Manajemen Perikanan, Universitas Terbuka pada :

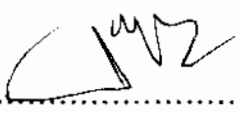
Hari/Tanggal : Kamis , 2 Februari 2012
 Waktu : 10.30 s/d 12.30 WIB

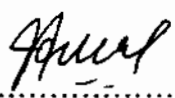
Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : 
 Dr. Suciati, M.Sc, Ph.D

Penguji Ahli : 
 Prof. Dr. Tamrin Usman, DEA

Pembimbing I : 
 Dr. Sugeng Hari Wisudo, M.Sc

Pembimbing II : 
 Dr. Nuraini Soleiman, M.Ed

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karuniaNya yang telah memberikan segala kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul “*Analisa Pengaruh Retribusi Perikanan terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Belitung*”. TAPM ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Pascasarjana di Program Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan Universitas Terbuka.

Dalam proses penyelesaian tugas akhir ini tentu saja tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan dorongan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada :

1. Suciati, MSc, PhD selaku Direktur Program Pascasarjana UT atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti kuliah di S2 UT.
2. Dr. Sugeng Hari Wisudo, M.Sc, selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu serta memberikan bimbingan dan membagi ilmu yang sangat berguna.
3. Dr. Nuraini Soleiman, M.Ed, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang bermanfaat.
4. Dr. Ir. Nurhasanah, MSi selaku Ketua Program Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan (MMP) atas motivasi dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama penulis mengikuti pendidikan di UT.
5. Kepala dan Staf Program Pascasarjana UPBJJ-UT Jakarta, atas segala bantuan dan layanan serta informasinya selama ini.
6. Ir. H. Darmansyah Husein, selaku Bupati Belitung yang telah memberikan izin belajar untuk mengikuti pendidikan kepada penulis.
7. Dr. Ir. Marwan Syaukani, M.Sc, selaku Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2006- 2010 yang telah memberikan dorongan dan dukungan untuk menempuh pendidikan di UT.

8. Ir. Toni HA Batubara, SE, MT, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung.
9. Kepala dan Staf Kantor Diklat Kabupaten Belitung yang telah memberikan dukungan materil selama menempuh pendidikan di UT.
10. Teman-Teman Mahasiswa Pascasarjana MMP UPBJJ-UT Jakarta yang telah memberikan dukungan semangat dan kerjasama yang baik selama menempuh pendidikan di UT.
11. Para Kasi dan Staf Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung yang telah memberikan dukungan, kerjasama dan bantuan.
12. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan moril dan spirituil yang tiada henti.
13. Teristimewa buat isriku Evi Hariyanti serta kedua putriku Nabila Destia Fitri dan Aniq Anisa Syahvina untuk kasih sayang yang sangat besar artinya bagi penulis dan dorongan serta doa selama penulis menyelesaikan pendidikan.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan dan memberikan rahmatNya kepada kita semua, amin.

Jakarta, 15 Desember 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	5
B. Kerangka Berpikir	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	20
B. Populasi dan Sampel.....	20
C. Variabel Penelitian	22
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Jadwal Waktu Penelitian	22
E. Metode Analisis Data.....	23
F. Hipotesis Penelitian.....	24

	Halaman
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Diskripsi Wilayah Kabupaten Belitung.....	25
B. Gambaran Umum Kondisi Perikanan Belitung.....	26 27
C. Deskriptif Responden	36
D. Hasil Uji Regresi Beda Dua Rata-Rata	52
E. Pembahasan	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	19
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Belitung	27
Gambar 4.2 Jumlah Nelayan Kab. Belitung	28
Gambar 4.3 Jumlah Armada Perikanan Kab. Belitung	30
Gambar 4.4 Komoditas Perikanan Kab. Belitung	33
Gambar 4.5 Pendapatan Bekerja Sebagai Nelayan	36
Gambar 4.6 Status Nelayan	37
Gambar 4.7 Sistem Upah/Penghasilan	38
Gambar 4.8 Besar Sistem Bagi Hasil (Setelah Dikurangi Biaya Operasional)	39
Gambar 4.9 Pendapatan Rata2/Bulan Sebelum Dihapusnya Retribusi	40
Gambar 4.10 Pengetahuan Tentang Tiga Retribusi	41
Gambar 4.11 Pernah/Tidaknya Membayar Retribusi	42
Gambar 4.12 Pendapat Dihapuskannya Retribusi	43
Gambar 4.13 Penghapusan Retribusi (Pengaruh/Tidak Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan)	44
Gambar 4.14 Lebih Besar/Kecil Hasil Pendapatan Saat Ini Dengan Sebelum Dihapusnya Retribusi	45
Gambar 4.15 Biaya (Modal Kerja) Rata-Rata yang Diperlukan untuk Sekali Melaut	46
Gambar 4.16 Kemana Menjual Hasil Tangkapan	47
Gambar 4.17 Rata-Rata Pendapatan/Bulan Setelah Dihapus Retribusi	48
Gambar 4.18 Jenis Perahu	49
Gambar 4.19 Jenis Alat Tangkap	50
Gambar 4.20 Jarak yang Ditempuh Ke Daerah Sasaran Melaut	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Jumlah Nelayan di Kabupaten Belitung Tahun 2010.....	21
Tabel 3.2. Jumlah Sampel Nelayan di Kabupaten Belitung.....	22
Tabel 3.3. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	23
Tabel 4.1 Penyebaran Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung.....	25
Tabel 4.2 Luas Kabupaten Belitung Dirinci Menurut Kecamatan.....	26
Tabel 4.3 Matrik Potensi Perikanan Pantai.....	28
Tabel 4.4 Matrik Potensi Perikanan Laut/Tangkap.....	31
Tabel 4.5 Rekapitulasi Produksi Hasil Perikanan Kab. Belitung, Tahun 2010.....	32
Tabel 4.6 Budidaya Laut Kabupaten Belitung.....	32
Tabel 4.7 Jenis dan Produksi Perikanan Kabupaten Belitung.....	34
Tabel 4.8 Lokasi Dermaga Ikan dan TPI Kabupaten Belitung.....	34
Tabel 4.9 Paired Samples Test.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Hasil Pengujian Paired Samples Tes.....	91
Lampiran 2. Kuesioner.....	92
Lampiran 3. Hasil Data Penelitian.....	97

Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Belitung merupakan sebuah kepulauan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan cukup besar, baik sumberdaya perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun sumberdaya non hayati (harta karun/BMKT, mineral, dan lain – lain) .

Secara geografis, wilayah Kabupaten Belitung memiliki luas 2.293.690 km² yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 2 (dua) kelurahan dan 41 (empat puluh satu) desa dengan jumlah penduduk 155.924 jiwa (data statistik tahun 2010), termasuk didalamnya 30% masyarakatnya yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.

Kabupaten Belitung merupakan kawasan kepulauan dengan kondisi perairan laut yang kaya akan potensi perikanan dan kelautan. Sumberdaya perikanan Kabupaten Belitung merupakan sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2010 jumlah nelayan 9.455 orang, jumlah armada penangkapan sebanyak 2.561 buah dengan jenis alat tangkap yang dominan yaitu pancing, jaring kepiting, bubu ikan, bubu kepiting, jaring insang dan bagan perahu. sedangkan produksi perikanan mencapai jumlah 42.501 Ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung, 2010). Kontribusi terbesar diberikan oleh sektor perikanan laut yang besarnya mencapai 90% terhadap total produksi rata-rata perikanan di Kabupaten Belitung. Hal ini menunjukkan bahwa

perikanan tangkap di laut merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Belitung.

Berdasarkan latar belakang potensi inilah, Pemerintah Kabupaten Belitung menempatkan sektor Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sektor unggulan yang sangat strategis untuk dikembangkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008 – 2025 (Bappeda Kab Belitung 2010).

Pengembangan usaha perikanan tangkap khususnya skala kecil antara lain terkendala oleh adanya pungutan-pungutan yang dibebankan kepada nelayan, keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengakses sumberdaya, permodalan, teknologi, informasi maupun pemasaran hasil perikanan. Kondisi demikian telah mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan penghapusan retribusi dan pungutan perikanan sebagaimana Surat Edaran (SE) Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor B.636/Men-KP/XI/09 Tanggal 16 November 2009.

Alasan lain dihapusnya retribusi perikanan yaitu : (a) respon perkembangan perekonomian global yang memberikan dampak kurang menguntungkan bagi usaha yang belum kondusif; (b) masih adanya pungutan (retribusi) yang membebani dan memberatkan nelayan, sehingga kesejahteraan serta produktivitas usaha nelayan rendah; (c) membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Jenis retribusi yang di bebaskan kepada nelayan di Kabupaten Belitung dan saat ini telah dihapus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor :

188.45/286/KEP/DKP/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 adalah retribusi tempat pendaratan kapal (Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2005), retribusi pelelangan hasil perikanan (Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2001) dan retribusi pengiriman ikan (Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2001). Kebijakan penghapusan retribusi bagi para nelayan ini menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.

B. Perumusan Masalah

Kehidupan masyarakat desa pesisir di Kabupaten Belitung pada umumnya masih sederhana dengan hanya menangkap ikan atau biota laut lainnya, serta bertempat tinggal di tepi pantai dan pulau-pulau kecil. Pada umumnya latar belakang pendidikan rendah dan memanfaatkan sumberdaya laut menggunakan masih dengan cara tradisional dan sederhana. Salah satu persoalan lain yang dihadapi nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka yakni adanya retribusi ataupun pungutan yang dibebankan kepada mereka. Atas nama Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemerintah daerah (Pemda) menciptakan kebijakan menggali sumber PAD salah satunya melalui retribusi perikanan. Namun seringkali pungutan-pungutan yang dibebankan kepada nelayan tersebut dirasakan sangat memberatkan, tak hanya pada kegiatan usaha mereka namun juga bagi peningkatan kesejahteraan nelayan.

Sejauh ini dampak kebijakan penghapusan retribusi perikanan terhadap peningkatan nelayan belum diketahui. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan guna menjawab permasalahan sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaruh kebijakan penghapusan retribusi perikanan terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kabupaten Belitung?
- 2) Bagaimana upaya untuk meningkatkan pendapatan nelayan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk :
Menganalisa pengaruh retribusi perikanan terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kabupaten Belitung.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi tentang pengaruh kebijakan penerapan retribusi perikanan terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kabupaten Belitung dan diharapkan bisa sebagai acuan tindak lanjut untuk penentuan kebijakan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Retribusi

Menurut Munawir (1997) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Lebih lanjut diuraikan pula definisi dan pengertian yang berkaitan dengan retribusi yaitu dikutip dari Jones and White (1998) yang mengatakan bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu lebih lanjut dikatakan bahwa retribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari pada biaya layanan, bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasional saja. Pada bagian lain Queen (1998:2) menerangkan bahwa:

“Suatu tanggapan menekankan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bagian yang gampang dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian tersulitnya adalah meyakinkan masyarakat (publik) tanpa diluar kesadaran mereka tarif tetap harus diberlakukan”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi menurut Haritz (1995:84) adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan bersifat ekonomis.
- 2) Ada imbalan langsung kepada pembayar.
- 3) Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar.
- 4) Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol.
- 5) Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

2. Retribusi Daerah

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya diketahui bahwa beberapa atau sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dikaji pengelolaan untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensi. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah.

Devas, dkk (1989:46) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sangat tergantung dari pemerintah pusat. Dalam garis besarnya penerima daerah (termasuk pajak yang diserahkan) hanya menutup seperlima dari pengeluaran pemerintah daerah. Meskipun banyak pula negara lain dengan keadaan yang sama atau lebih buruk lagi. Memang pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat memiliki tingkat otonom yang berarti, yang penting adalah "wewenang di tepi" artinya memiliki penerimaan daerah sendiri yang

cukup sehingga dapat mengadakan perubahan di sana-sini. Pada tingkat jasa layanan yang disediakan, untuk itu mungkin sudah memadai jika 20% dari pengeluaran yang berasal dari sumber-sumber daerah. Hal tersebut diuraikan oleh Queen (1998:12-18) bahwa:

“Pertumbuhan lain dalam meningkatnya retribusi yaitu peran masyarakat (publik) dalam politik. Masyarakat tidak senang terhadap perubahan hanya akan toleransi terhadap pembayaran retribusi, bukan semata sebagai sumber utama pendapatan daerah tetapi hanya dana pendamping”.

3. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

Menurut Kusumastanto (2000) agar pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir (nelayan), maka langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan desa pantai dan pemberian insentif kepada masyarakat pesisir untuk meningkatkan produktivitasnya. Insentif yang diberikan meliputi kemudahan terhadap pengembangan usaha seperti perizinan, subsidi, pinjaman dan menjaga kestabilan harga.
- 2) Pendekatan aktivitas sekunder seperti budidaya tambak, budidaya rumput laut dan industri pengolahan. Upaya untuk menggalakkan aktivitas sekunder tersebut juga harus disertai dengan kemudahan dalam pemberian perizinan, subsidi dan bantuan dana kemitraan dengan pengusaha besar dan pemasaran.
- 3) Pembentukan lembaga yang sesuai dengan karakteristik usaha dan peningkatan kegiatan usaha nelayan, khususnya untuk pengembangan perikanan dan

aktivitas-aktivitas sekunder yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir atau nelayan.

- 4) Penataan perairan pesisir dan lautan secara lokal untuk menentukan daerah penangkapan antara perikanan skala kecil dan perikanan skala besar. Strategi penataan ruang perairan pesisir untuk daerah penangkapan adalah menetapkan zonasi atau peta operasional untuk setiap usaha perikanan berdasarkan kemampuan operasi (perikanan rakyat dan industri) yang dilengkapi aspek hukum, termasuk pengaturan dan sanksi.

Menurut WCED (1987); Anutha dan Johnson (1996) istilah pengembangan berkelanjutan berarti mengelola pengguna, mengembangkan dan melindungi sumberdaya fisik dan alami atau pada satu tingkatan di mana keberadaan seseorang dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, kesejahteraan budaya, kesehatan dan keamanan sewaktu: (1) menopang potensi sumberdaya alam dan fisik untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. (2) perlindungan kebutuhan hidup berupa kapasitas udara, air, tanah dan ekosistem. (3) mencegah, memperbaiki atau memitigasi setiap dampak yang kurang baik terhadap lingkungan. Tujuannya adalah memadukan pembangunan dengan lingkungan sejak awal proses penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan yang strategik sampai kepada penerapannya di lapangan (Aryanto, 2003).

Pembangunan yang komprehensif menurut Asian Development Bank (ADB) dalam Nikijuluw (1995) adalah pembangunan dengan memiliki ciri-ciri (1) berbasis lokal, (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, (3) berbasis kemitraan, (4) secara holistik, dan (5) berkelanjutan. Pengelolaan berbasis

masyarakat setempat atau biasa disebut *Community-Based Management* (CBM). Pemanfaatan secara lestari hanya akan dicapai jika sumberdaya dikelola secara baik, proporsional dan transparan. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, alam, buatan dan sosial (Keraf, 2000).

Menurut Nikijuluw (1995) pendekatan pengelolaan sumberdaya alam sangat didukung oleh tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir dan bahari di Indonesia antara lain: (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, (2) Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan secara optimal dan lestari, (3) Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan, (4) Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan.

Tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable*), maka Albertson (1999) dalam risetnya menyebutkan dimensi-dimensi:

- 1) *Environmental Sustainability* : perlindungan untuk generasi mendatang.
- 2) *Economic Sustainability* : setiap pengembangan variabel secara ekonomi.
- 3) *Socio-Cultural Sustainability*: setiap inovasi harus harmoni antara pengetahuan lokal sosial-budaya, praktek, pengetahuan dan teknologi tepat guna (Hardin, 1985).
- 4) *Political Sustainability*: keterkaitan birokrasi (pemerintah) dan masyarakat.

Para pemimpin formal dan informal untuk suatu sektor tertentu dalam masyarakat lokal harus mampu menjalin komunikasi dengan struktur-struktur politik dan birokrasi. Hilangnya keterkaitan birokrasi terjadi karena tidak

adanya perantara (*interface*). Sama halnya dengan pendapat Fauzi dan Anna (2002) yang menyatakan bahwa konsep pembangunan perikanan yang berkelanjutan sendiri mengandung aspek:

- 1) *Ecological sustainability* (keberlanjutan ekologi). Dalam pandangan ini memelihara keberlanjutan stok/biomass sehingga tidak melewati daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas dari ekosistem menjadi fokus utama.
- 2) *Socioeconomic sustainability* (keberlanjutan sosioekonomi). Konsep ini mengandung makna bahwa pembangunan perikanan harus memperhatikan keberlanjutan dari kesejahteraan pelaku perikanan baik pada tingkat individu. Dengan kata lain mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi merupakan fokus dalam kerangka keberlanjutan.
- 3) *Community sustainability*, mengandung makna bahwa keberlanjutan kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat haruslah menjadi perhatian membangun perikanan yang berkelanjutan.
- 4) *Institutional sustainability* (keberlanjutan kelembagaan). Dalam kerangka ini keberlanjutan kelembagaan yang menyangkut memelihara aspek finansial dan administrasi yang sehat merupakan prasyarat dari ketiga pembangunan berkelanjutan di atas.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Arrow et al., (1995); Dahuri (1998) dan Lim (1998) tentang garis besar konsep pembangunan berkelanjutan yang memiliki empat dimensi, yaitu ekologis, sosial ekonomi budaya, sosial politik, serta hukum dan kelembagaan untuk pemecahan masalah-masalah di wilayah pesisir.

4. Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan

Berbagai hasil kajian penelitian, selama ini, tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan telah mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka, khususnya yang tergolong nelayan buruh atau nelayan-nelayan kecil hidup dalam kubangan kemiskinan.

Kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal kehidupan sehari-hari sangat terbatas. Bagi masyarakat nelayan, diantara beberapa jenis kebutuhan pokok kehidupan, kebutuhan yang paling penting adalah pangan. Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan pangan setiap hari sangat berperan besar untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Kusnadi (2006) mengidentifikasi sebab-sebab pokok yang menimbulkan kemiskinan nelayan:

- 1) Belum adanya kebijakan dan aplikasi pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terintegrasi atau terpadu di antara para pelaku pembangunan. Strategi-strategi yang dapat ditempuh:
 - a) Mendorong secara bertahap format kebijakan pembangunan nasional pada masa mendatang untuk lebih berorientasi pada pengembangan sektor kemaritiman nasional karena memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibanding sumberdaya yang lain.
 - b) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi program pembangunan antar unit kerja di internal instansi departemen, lintas departemen, atau antar pelaku pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan.
 - c) Mendorong pemda merumuskan *blue print* kebijakan pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan secara terpadu dan berkesinambungan.

- 2) Menjaga konsistensi kuantitas produksi (hasil tangkap) sehingga aktivitas sosial ekonomi perikanan di desa-desa nelayan berlangsung terus. Strategi yang dapat ditempuh:
- a) Meningkatkan kualitas teknologi penangkapan dan dukungan fasilitas lain yang memadai. Sifat teknologi tersebut adalah ramah lingkungan, relevan dengan kondisi perairan, dan bisa mengatasi tantangan alam.
 - b) Meningkatkan akses informasi nelayan terhadap layanan peta lokasi potensi ikan.
 - c) Menjaga kelestarian lingkungan laut dengan berbagai upaya yang konstruktif dan berlanjut.
- 3) Masalah isolasi geografis desa nelayan, sehingga menyulitkan keluar masuk barang, jasa, kapital, dan manusia. Berimplikasi melambatkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nelayan. Strategi yang dapat ditempuh:
- a) Membangun sarana dan prasarana ekonomi, seperti jalan raya, sarana transportasi, pelabuhan perikanan, dan fasilitas pendukung lainnya.
 - b) Membangun pusat informasi dan fasilitas pendukungnya.
- 4) Keterbatasan modal usaha atau investasi sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikanan. Strategi yang dapat ditempuh:
- a) Mengembangkan fungsi lembaga keuangan mikro dan koperasi yang memihak nelayan.
 - b) Membangun usaha bersama, seperti melalui pemilikan sarana-sarana penangkapan secara kolektif.

- 5) Adanya relasi sosial ekonomi “eksploitatif” dengan pemilik perahu dan pedagang perantara (tengkulak) dalam kehidupan masyarakat nelayan. Strategi yang dapat ditempuh:
- a) Mengurangi beban utang piutang yang kompleks para nelayan kepada pemilik perahu dan tengkulak.
 - b) Memperbaiki norma sistem bagi hasil dalam organisasi penangkapan, sehingga tidak merugikan nelayan.
 - c) Mengoptimalkan peran lembaga ekonomi lokal, seperti KUD Mina dan TPI.
- 6) Rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, berdampak sulitnya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup. Strategi yang dapat ditempuh:
- a) Meningkatkan pemilikan lebih dari satu jenis alat tangkap, agar bisa menangkap sepanjang musim.
 - b) Mengembangkan diversifikasi usaha berbasis bahan baku perikanan atau hasil budidaya perairan, seperti rumput laut.
 - c) Memperluas kesempatan kerja sektor *off fishing*.
 - d) Transmigrasi nelayan.
- 7) Kesejahteraan sosial nelayan yang rendah sehingga mempengaruhi mobilitas sosial mereka. Strategi yang dapat ditempuh:
- a) Membangun fasilitas sosial untuk kepentingan publik.
 - b) Mengurangi “gaya hidup boros” atau pengeluaran rumah tangga yang kurang perlu dan mentradisikan menabung (*saving*)
 - c) Mengembangkan program pendidikan atau pelatihan ketrampilan menengah berbasis kegiatan ekonomi perikanan dan kelautan, bagi anak-anak nelayan.

8) Lemah karsa (Prof. Herman Soewardi)

Para pakar ekonomi sumberdaya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Faktor-faktor yang dimaksud menyebabkan nelayan tetap dalam kemiskinannya.

Smith (1979) yang mengadakan kajian pembangunan perikanan di berbagai negara Asia serta Anderson (1979) yang melakukannya di negara-negara Eropa dan Amerika Utara tiba pada kesimpulan bahwa kekakuan aset perikanan (*fixity and rigidity of fishing assets*) adalah alasan utama kenapa nelayan tetap tinggal atau bergelut dengan kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan itu. Kekakuan aset tersebut adalah karena sifat aset perikanan yang begitu rupa sehingga sulit untuk dilikuidasi atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan bagi kepentingan lain.

Akibatnya pada saat produktivitas aset tersebut rendah, nelayan tidak mampu untuk mengalih fungsikan atau melikuidasi aset tersebut. Karena itu, meskipun rendah produktivitas, nelayan tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang sesungguhnya tidak lagi efisien secara ekonomis.

Subade dan Abdullah (1993) mengajukan argumen lain yaitu bahwa nelayan tetap tinggal pada industri perikanan karena rendahnya *opportunity cost* mereka. *Opportunity cost* nelayan, menurut definisi, adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha ekonomi lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan kata lain, *opportunity cost* adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila

opportunity cost rendah maka nelayan cenderung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien.

Ada juga argumen yang mengatakan bahwa *opportunity cost* nelayan, khususnya di negara berkembang, sangat kecil dan cenderung mendekati nihil. Bila demikian maka nelayan tidak punya pilihan lain sebagai mata pencahariannya. Dengan demikian apa yang terjadi, nelayan tetap bekerja sebagai nelayan karena hanya itu yang bisa dikerjakan.

Panayotou (1982) mengatakan bahwa nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (*preference for a particular way of life*). Pendapat Panayotou (1982) ini dikalimatkan oleh Subade dan Abdullah (1993) dengan menekankan bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata beorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena *way of life* yang demikian maka apapun yang terjadi dengan keadaannya, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah baginya. *Way of life* sangat sukar dirubah. Karena itu maka meskipun menurut pandangan orang lain nelayan hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupan itu.

5. Hasil Kajian Penelitian

Penelitian Sujarno (2008) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kabupaten Langkat. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengamati dan menganalisis empat faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kabupaten Langkat yaitu: modal kerja, tenaga kerja, pengalaman dan jarak tempuh melaut dengan menggunakan metode *Ordinary Least Squares (OLS)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh hasil modal kerja, tenaga kerja, pengalaman dan jarak tempuh melaut secara bersama-sama mempengaruhi pendapatan nelayan di Kabupaten Langkat.

Dari empat faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan faktor modal kerja memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan faktor tenaga kerja, pengalaman dan jarak tempuh melaut dengan demikian dalam kegiatan melaut para nelayan lebih memperhatikan modal kerja. Namun, juga harus memperhatikan faktor tenaga kerja, jarak tempuh melaut karena faktor tersebut juga merupakan faktor-faktor penunjang pendapatan nelayan.

Zulfikar (2002), hasil penelitiannya tentang analisis sistem bagi hasil terhadap pendapatan buruh nelayan di Kabupaten Deli Serdang, bahwa hasil analisis dapat diketahui untuk uji beda rata-rata nelayan melaut rawai dan melaut pancing diperoleh t -terhitung 12,20 pada tingkat pengujian signifikan 5% maka t -tabel = 1.734. Karena t -hitung $>$ t -tabel maka H_0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan melaut merawai dan pancing. Untuk uji beda rata-rata melaut pancing dan melaut jarring diperoleh t -hitung 2,12 pada tingkat signifikan 5% maka t -tabel maka H_0 ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara melaut pancing dan jarring.

Salim (1999), dalam penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, menyatakan bahwa variabel independen jarak tempuh melaut, modal, pengalaman, jumlah perahu dan tenaga kerja dapat menerangkan variasi variabel dependent (pendapatan nelayan) sebesar 98,7%, dan variabel independen yang bisa diperhitungkan atau berpengaruh terhadap variabel dependen adalah

pengalaman dan jumlah perahu yang masing-masing nyata pada taraf signifikansi 95% dan 99%. Untuk variabel pengalaman dan jumlah perahu masing-masing hipotesis diterima sedangkan untuk variabel yang lain ditolak.

Sasmita (2006) dalam penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha nelayan di Kabupaten Asahan, menyatakan bahwa variabel independen modal kerja, jumlah tenaga kerja, waktu melaut dan pengalaman yang dapat menerangkan variasi variabel dependen (pendapatan usaha nelayan) sebesar 60,7%. Dari variabel independen yang diteliti modal kerja dan melaut signifikan pada tingkat signifikan 5%, sedangkan jumlah tenaga kerja pada tingkat signifikansi 10%.

Harahap (2003) dalam penelitian tentang analisis masalah kemakmuran dan tingkat pendapatan nelayan tradisional di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, menyatakan bahwa variabel independen modal investasi awal, jam melaut, biaya operasional signifikan pada tingkat $\alpha - 10\%$.

Radianto, Risna dan Manadianto (2010), dalam penelitian tentang Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Retribusi Perikanan (Studi Kasus di Daerah Subang, Jawa Barat). Data penelitian yang diperoleh, dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan keadaan secara komprehensif mengenai dampak penghapusan retribusi perikanan, jika diberlakukan di Kabupaten Subang. Pada umumnya nelayan di Kabupaten Subang menyambut baik SE Men-KP. Dihapuskannya retribusi perikanan membuat nelayan tidak lagi terbebani atau dapat dikatakan sebagai bentuk kemerdekaan nelayan. Fenomena ini terlihat pada wilayah yang mayoritas penduduknya merupakan nelayan kecil. Nelayan kecil ini

pada umumnya mempunyai penghasilan yang minim, jadi jika retribusi perikanan dihapuskan akan menambah pendapatan ekonomi nelayan.

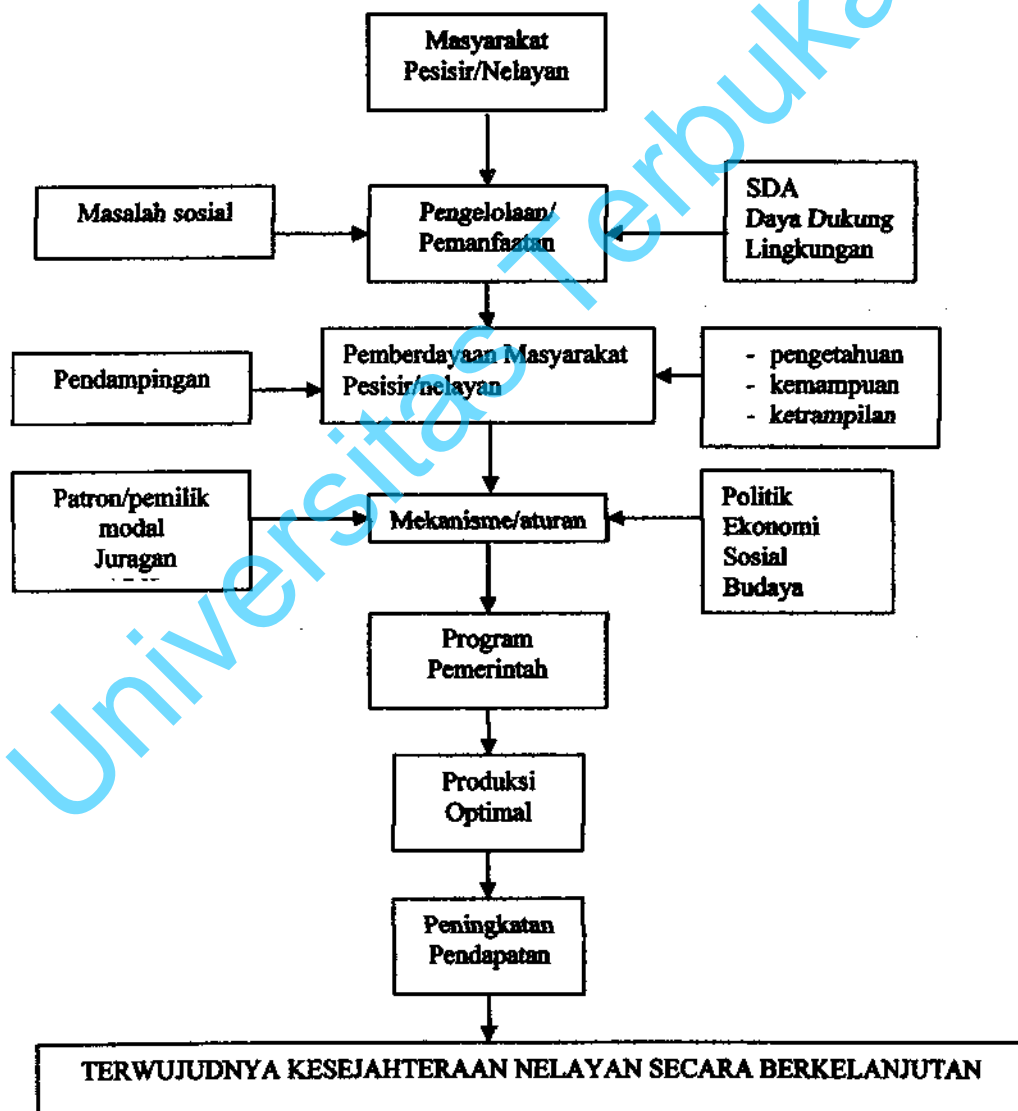
Pernyataan tersebut berbeda dengan yang dialami oleh nelayan di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. Mereka justru khawatir rencana penghapusan retribusi perikanan akan berpengaruh terhadap kegiatannya selama ini (hasil wawancara dengan nelayan Kecamatan Blanakan, tanggal 27 Agustus 2010). Retribusi perikanan yang dipungut kepada nelayan oleh nelayan, apabila dihapus menyebabkan mereka kesulitan dana dan tidak ada yang membantu (hasil wawancara dengan nelayan Kecamatan Blanakan, tanggal 27 Agustus 2010). Tujuan adanya retribusi perikanan, yaitu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keperluan nelayan. Kebutuhan dan keperluan nelayan tersebut, meliputi : dana paceklik, asuransi nelayan, dana sosial kecelakaan, dan tabungan nelayan (hasil wawancara dengan sekretaris KUD Mina Fajar Sidik, Kecamatan Blanakan, tanggal 27 Agustus 2010). Selama ini sumber dana kebutuhan dan keperluan nelayan, diakomodir melalui hasil retribusi perikanan. Retribusi perikanan selain digunakan untuk kebutuhan nelayan (sekitar 1%-2%), masuk juga ke dalam PAD. Pengalokasian tersebut didasarkan pada ketentuan PERDA Jabar No. 5/2005. Pelaksanaan penghapusan retribusi memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan PEMDA Kabupaten Subang, untuk mampu menjamin semua kebutuhan serta keperluan nelayan.

Retribusi perikanan yang diberlakukan sekarang dirasakan nelayan Kecamatan Blanakan tidak memberatkan, bahkan justru memberikan

keuntungan bagi mereka (hasil wawancara dengan nelayan Kecamatan Blanakan, tanggal 27 Agustus 2010).

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam kegiatan penelitian, kerangka atau desain penelitian merupakan unsur pokok yang harus ada sebelum proses penelitian dilaksanakan. Karena dengan sebuah desain yang baik pelaksanaan penelitian menjadi terarah, jelas, dan maksimal.

Terkait dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian survei pendekatan eksplanatif menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa dengan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (penghapusan retribusi) terhadap variabel terikat (peningkatan pendapatan nelayan), yaitu sebuah penelitian yang menggunakan instrumen alat penelitian adalah kuisisioner, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel dengan menggunakan peranti lunak statistik SPSS.

B. Populasi dan Sampel

Penelitian ini adalah penelitian sampling kelompok terhadap populasi, di mana sampel merupakan kelompok yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang mencakup semua elemen dan unsur-unsur (Dhofir, 2000:36). Sedangkan sampel masih dalam buku yang sama, adalah sebagian subjek penelitian yang memiliki kemampuan mewakili seluruh data

(populasi). Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah nelayan yang tersebar di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Belitung, adapun rincian jumlah nelayan di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Nelayan di Kabupaten Belitung Tahun 2010

Kecamatan <i>District</i>	JUMLAH NELAYAN (orang) <i>Number of Fisherman (persons)</i>
(1)	(2)
1. Membalong	2.361
2. Tanjungpandan	1.530
3. Sijuk	2.560
4. Badau	721
5. Selat Nasik	2.372
Jumlah	<i>Total</i> 9.544

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Belitung 2010

Sampel dipilih pada 5 (lima) kecamatan wilayah pesisir secara proporsi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel acak sederhana (*Simple random sampling*) sehingga diperoleh sampel yang dapat mewakili (*representatif*). Dengan perhitungan sampel sebagai berikut :

$$n \geq \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Dengan jumlah populasi 9.544 nelayan dan *standard error* sebesar 0,10 (10%) maka jumlah sampel minimal adalah :

$$\begin{aligned} n &\geq \frac{9.544}{9.544 (0,10)^2 + 1} \\ &\geq 98,96 = 100 \end{aligned}$$

Dengan demikian jumlah sampel yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 100 nelayan.

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Nelayan di Kabupaten Belitung

Kecamatan <i>District</i>	JUMLAH NELAYAN (orang) <i>Number of Fisherman (persons)</i>	Persentase	Nelayan sampel
(1)	(2)		
1. Membalong	2.361	25%	25
2. Tanjungpandan	1.530	16%	16
3. Sijuk	2.560	27%	27
4. Badau	721	8%	8
5. Selat Nasik	2.372	25%	25
<i>Jumlah Total</i>	9.544	100%	100

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Belitung 2010

C. Variabel Penelitian

Variabel yang diangkat dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) pada penelitian ini kebijakan penghapusan retribusi perikanan, sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah peningkatan pendapatan nelayan.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Jadwal Waktu Penelitian

1. Prosedur Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka dan dapat mengoperasikan tanda matematika (+, -, <, x, :). Jadi angka-angka tersebut dapat dihitung. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dengan cara melakukan survei dan observasi

langsung ke lapangan melalui kuiseoner dan wawancara dengan nelayan yang mencakup aspek kelembagaan, latar belakang sosial dan struktur sosial.

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, antara lain: laporan tahunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Belitung, Belitung Dalam Angka dari BPS dan data dari perguruan tinggi yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, yang dimulai pada bulan September - November 2010. Kegiatan ini meliputi tahapan persiapan, studi pustaka, pengumpulan data baik primer maupun sekunder, penyusunan basis data, analisis data yang didapat pada waktu penelitian adapun jadwal pelaksanaan penelitian kegiatan tersebut sebagai berikut.

Tabel 3.3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Kegiatan	September				Oktober				Nopember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Sebelum ke lapangan												
	- Penjajagan ke lapangan	■											
	- Pembuatan kuesioner		■										
2.	Di lapangan			■									
	- Pengumpulan data				■	■	■	■					
3.	Setelah dari lapangan												
	- Edit data							■	■	■			
	- Tabulasi data									■	■		
	- Analisis data										■	■	
	- Pembuatan draft TAPM											■	■

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan menggunakan uji beda dua rata-rata (*paired sample test*) untuk menguji

perbedaan sebelum dihapusnya retribusi dengan sesudah dihapusnya retribusi.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : $\mu_1 = \mu_2$ Tidak terdapat perbedaan antara pendapatan rata-rata nelayan sebelum dan sesudah penghapusan retribusi

H_a : $\mu_1 \neq \mu_2$ Terdapat perbedaan antara pendapatan rata-rata nelayan sebelum dan sesudah penghapusan retribusi

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam kerangka berpikir ilmiah, hipotesis diajukan setelah merumuskan masalah karena pada hakekatnya hipotesis adalah jawaban sementara yang belum tentu benar dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh serta hubungan yang positif antara dua variabel atau lebih perlu dirumuskan suatu hipotesis. Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran obyektif tentang pengaruh kebijakan penghapusan retribusi perikanan terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kabupaten Belitung. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis Nol (H_0)

Tidak ada pengaruh yang signifikan dari kebijakan penghapusan retribusi perikanan terhadap peningkatan pendapatan nelayan di Kabupaten Belitung.

Hipotesis Kerja/Alternatif (H_a)

Ada pengaruh yang signifikan akibat dari kebijakan penghapusan retribusi perikanan terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Belitung.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Wilayah Kabupaten Belitung

Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107008' BT – 107058' BT dan 02030' LS sampai 03015' LS dengan luas wilayah sebesar 229.369 hektar atau 2.293,69 kilometer persegi. Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 100 buah pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung, disamping itu masih ada pulau besar lainnya seperti Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu.

Tabel 4.1 Penyebaran Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung

No.	Kecamatan	Jumlah Pulau
1	Membalong	23
2	Tanjungpandan	5
3	Sijuk	36
4	Badau	10
5	Selat Nasik	26
Jumlah/ Total		100

Sumber : Belitung Dalam Angka, 2010

Pada peta dunia Pulau Belitung dikenal dengan nama **BILLITONIT** yang bergaris tengah Timur-Barat + 79 km dan garis tengah Utara-Selatan + 77 km. Batas wilayah Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Cina Selatan

Sebelah Timur : Kabupaten Belitung Timur

Sebelah Selatan : Laut Jawa

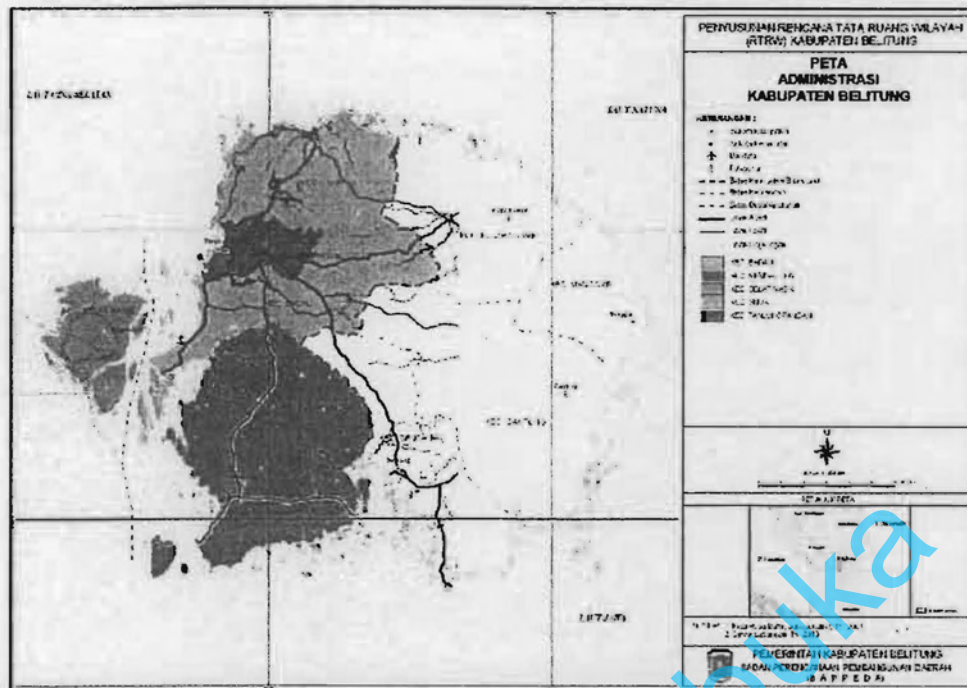
Sebelah Barat : Selat Gaspar

Tabel 4.2 Luas Kabupaten Belitung Dirinci Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	%
1.	Membalong	909,550	39,65
2.	Tanjung Pandan	378,448	16,50
3.	Badau	458,200	19,95
4.	Sijuk	413,992	18,05
5.	Selat Nasik	133,500	5,82
Total		2.293,69	100,00

Sumber: Belitung dalam Angka (2009)

Kabupaten Belitung terdiri atas lima kecamatan, yaitu Kecamatan Membalong, Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Badau, Kecamatan Sijuk, dan Kecamatan Selat Nasik. Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas, yaitu 909,550 kilometer persegi (39 persen dari total luas wilayah) adalah Kecamatan Membalong. Kecamatan Selat Nasik memiliki luas wilayah paling kecil di Kabupaten Belitung sebesar 133.500 kilometer persegi (5,82 persen).



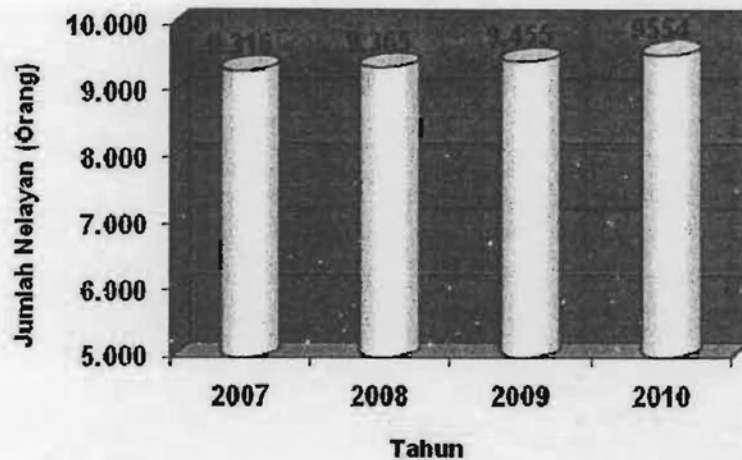
Sumber: Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitong (2010)

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Belitong

B. Gambaran Umum Kondisi Perikanan Belitong

Kabupaten Belitong secara langsung berbatasan dengan laut, sehingga mempunyai potensi perikanan laut yang cukup, namun potensi alam yang besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal terutama sektor perikanan laut atau perikanan tangkap di wilayah laut yang dimiliki wilayah perencanaan dengan luas areal penangkapan yang cukup luas.

Data yang tersedia dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitong, diketahui bahwa nelayan merupakan potensi tenaga kerja yang cukup besar di Kabupaten Belitong dengan kecenderungan yang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir, terkait dengan potensi kelautan yang sangat besar pula, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Belitung 2011

Gambar 4.2 Jumlah Nelayan Kab. Belitung

1. Potensi Sumberdaya Perikanan Pantai/Pesisir

Potensi perikanan pantai di Kabupaten Belitung secara deskriptif disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Matrik Potensi Perikanan Pantai

NO	KECAMATAN DESA PANTAI	PANTAI	KOMODITAS PERIKANAN TANGKAP PANTAI
1	Kec. Membalong		
	Desa Pulau Selu	Pasir, pantai berbatu, mangrove, baringtonia	udang, rajungan, kepiting bakau, cumi-cumi, teripang
	Desa Mentigi	Pasir, pantai berbatu, mangrove	udang, rajungan, kepiting bakau, teripang
	Desa Tanjung Rusa	idem	-
	Desa Membalong	Pasir	-
	Desa Kembiri	Pasir	-
	Desa Perpat	Pantai berlumpur, mangrove	-
	Desa Lassar	Pasir, pantai berbatu, semak	udang, rajungan, teripang, kerang
	Desa Simpang Rusa	Pasir, pantai berlumpur, mangrove	-
	Desa Pulau Sumedang	Pasir, pantai berbatu	udang, rajungan, cumi-cumi, ubur-ubur, teripang, kerang

NO	KECAMATAN DESA PANTAI	PANTAI	KOMODITAS PERIKANAN TANGKAP PANTAI
2	Kec.Tanjungpandan		
	a. Ds.Tj.Pendam	Pasir putih, cemara, ketapang, akasia, semak	Kijing
	b. Ds.Air Saga	Pasir putih, mangrove, semak	Udang, kepiting bakau
	c. Ds. Juru Sebrang	Pasir putih, mangrove, cemara, ketapang, akasia, semak, nipah	Udang, kepiting bakau teripang, kerang
3	Kec.Sijuk		
	a. Ds.Terong	Pantai berlumpur, baringtonia, mangrove	-
	b. Ds.Tj.Binga	Pasir putih, pantai berbatu, mangrove	udang, rajungan, kepiting bakau, cumi-cumi, ubur-ubur, teripang
	c. Ds.Batu Itam	Pantai berlumpur, baringtonia, mangrove	
	d. Ds.Keciput	Pasir putih, pantai berbatu, baringtonia, mangrove, semak	udang, rajungan, kepiting bakau, cumi-cumi, ubur-ubur, teripang
	e. Ds.Sujuk	idem	idem
	f. Ds.Sungai Padang	Pasir putih, pantai berlumpur, baringtonia, mangrove	udang, rajungan, kepiting bakau, cumi-cumi, ubur-ubur, teripang, kerang
4	Kec.Badau		
	a. Ds.Pegantungan	Pasir putih, pantai berlumpur, baringtonia, mangrove, semak, nipah	Udang, rajungan, kepiting bakau
	b. Ds.Sungai Samak	idem	idem
5	Kec.Selat Nasik		
	a. Ds.Selat Nasik	Pasir berlumpur, mangrove	udang, rajungan, kepiting bakau, cumi-cumi, teripang, kerang
	b. Ds.Suak Gual	idem	idem
	c. Ds.Petaling	idem	idem
	d. Ds.Pulau Gersik	idem	idem

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Belitung 2010

Nelayan di Kabupaten Belitung umumnya merupakan nelayan tradisional yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk menangkap ikan secara turun temurun atau merupakan nelayan pindahan dari daerah lain. Sementara itu, jenis-jenis ikan yang ditangkap di perairan Kabupaten Belitung sangat beragam. Akan tetapi lebih dari 60% merupakan jenis ikan-ikan pelagis kecil yaitu lemuru, selar,

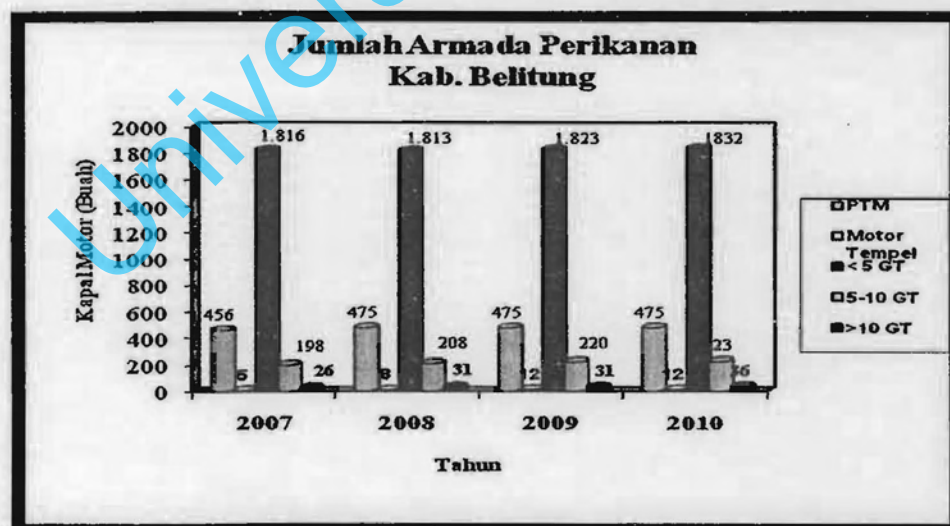
tongkol, dan teri, sedangkan sisanya terdiri dari ikan karang (kerapu, kakap merah), ikan dasar (mayong, cucut, bulat, bawal) dan jenis non ikan (cumi-cumi, kepiting, teripang).

2. Potensi Sumberdaya Perikanan Laut

Pemanfaatan sumberdaya ikan di Kabupaten Belitung semakin berkembang akibat tingginya permintaan pasar akan ikan konsumsi segar seperti ikan tenggiri, ikan kerapu, ikan kakap, ikan baronang, ikan ekor kuning, dan ikan pisang-pisang.

Ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi ditangkap di perairan Kabupaten Belitung dengan berbagai cara seperti pancing, bubu, jaring, muroami (kongsi) dan bom (peledakan).

Nelayan Kabupaten Belitung menangkap ikan umumnya menggunakan motor boat dengan kapasitas 1 GT – 15 GT dan bagan tancap/perahu. Namun, masih ada nelayan yang menangkap/memancing ikan menggunakan kapal tradisional seperti jukung, kater dan perahu kecil.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Belitung 2011

Gambar 4.3 Jumlah Armada Perikanan Kab. Belitung

Tabel 4.4 Matrik Potensi Perikanan Laut/Tangkap

NO	KECAMATAN DESA PANTAI	LOKASI PERIKANAN TANGKAP	AKTIVITAS BUDIDAYA PERIKANAN
1	Kec.Membalong Desa Pulau Selu Desa Pulau Sumedang	Gugus Pulau Sumedang & Pulau Selu Laut Jawa	Rumput laut, Kerapu.
2	Kec.Tanjungpandan Desa Juru Sebrang	Gugus Pulau Gersik dan Selat Nasik	Kepiting, Teripang, Litbang perikanan
3	Kec.Sijuk Desa Tj.Binga Desa.Keciput Desa Sungai Padang	Selat Karimata Selat Karimata Selat Karimata	Rumput laut, UPT, BBI KJA/Kerapu KJA/Kerapu
4	Kec.Badau Desa Pegantungan Desa Sungai Samak	Gugus Pulau Gersik dan Selat Nasik	Rumput laut, Kerapu Rumput laut, Kerapu, Pembibitan udang
5	Kec.Selat Nasik Desa Selat Nasik Desa Suak Gual Desa Petaling Desa Pulau Gersik	Gugus Pulau Gersik, Selat Nasik dan Selat Gaspar	Rumput laut, Mutiara, Kerapu, Rumput laut, Mutiara, Kerapu, Rumput laut, Mutiara, Kerapu, Rumput laut, Mutiara, Kerapu,

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Belitung 2010

Daerah penangkapan yaitu perairan Pulau Mendanau, perairan Selat Perlak, perairan Selat Nado, Perairan Tanjung Kubu, dan perairan Tanjung Jempu.

Produksi ikan basah terbesar berasal dari Kecamatan Selat Nasik sebesar 12.860 Ton, kemudian disusul Kecamatan Membalong sebesar 9.133,78 Ton. Sedangkan yang terkecil dari Kecamatan Badau sebesar 5.157,27 Ton. Jenis ikan dominan pada setiap Kecamatan menunjukkan keragaman yang kecil. Artinya tidak ada karakteristik khusus dari hasil tangkapan pada setiap kecamatan terhadap jenis ikan yang ditangkap. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.5 Rekapitulasi Produksi Hasil Perikanan Kab. Belitung, Tahun 2010

No	Kecamatan	Produksi (ton)					
		1	2	3	4	5	6
1	Tanjung pandan	7.172,04	7.10	43.62	23,17	-	77,36
2	Membalong	6.172,05	28.15	857.50	1.821,88	-	329,36
3	Sijuk	7.573,84	15.39	32.91	141,82	-	1.145,84
4	Badau	3.573,37	5.56	459,98	854,02	6,02	263,88
5	Selat Nasik	12.511,20	-	-	-	184,81	163,36
Jumlah		36,955.50	56,20	1.394,01	2.840,90	190,83	1.980,79

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung 2011

Keterangan:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1 : Ikan Laut | 4 : Rajungan |
| 2 : Ikan Air Tawar | 5 : Teripang |
| 3 : Udang | 6 : Cumi-cumi |

3. Potensi Budidaya Laut

Data perikanan budidaya laut di Kabupaten Belitung masih terbatas. Budidaya laut yang telah dilakukan oleh masyarakat adalah keramba jaring apung kerapu (*Ephinephelus* sp), budidaya rumput laut (*Eucheuma* sp) dan budidaya udang windu (*Panaeus monodon*). Budidaya keramba jaring apung kerapu terdapat di Pulau Rengit, Desa Pegantungan Kecamatan Badau, Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk dan Pulau Nado, desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik

Tabel 4.6 Budidaya Laut Kabupaten Belitung

TEKNIK BUDIDAYA	KOMODITI	JENIS BUDIDAYA	LOKASI	JUMLAH LOKASI DAN UNIT	UKURAN
1. Jaring apung	Kerapu	Pembesaran	Desa Pegantungan, P. Burung, Desa Selat Nasik, Tg Rusa	4 lokasi; 99 unit	8 kurungan per unit @3x3 m2
			Dusun Sungai Padang, Sijuk	2 lokasi; 2 unit	36 kurungan per unit
2. Rumput Laut	Eucheuma sp	Pembibitan Pembesaran	Selat Nasik Nado, membalong	1 lokasi	
3. Tambak (tidak beroperasi sejak 1998)	Udang (<i>Panaeus Monodon</i>)	Pembesaran	Tanjung Tinggi, Sijuk	1 lokasi	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung 2010

4. Budidaya Ikan Kerapu dan Rumput Laut

Usaha budidaya ikan kerapu dan budidaya rumput laut telah berkembang di Kabupaten Belitung walaupun masih secara tradisional. Ikan kerapu dibesarkan di keramba jaring apung seperti di Pulau Nado, Selat Nasik, Sungai Padang, Pulau Burung dan Pulau Rengit. Ikan berukuran \pm 4 inci hasil tangkapan dengan bubu, maupun hasil pembibitan dibesarkan selama 2 - 4 bulan sampai dengan ukuran 12 inci dikirim ke Jakarta atau Batam/Moro/Singapura.

Perikanan tangkap masih merupakan usaha andalan dari sektor ini. Pada tahun 2005, hasil perikanannya tidak saja diperdagangkan secara domestik namun telah mampu menembus pasar ekspor. Jenis komoditi yang diantarpulaukan adalah ikan segar (1.605,99 ton), ikan olahan/asin (640,00 ton), dan ikan beku (279,15 ton).



Gambar 4.4 Komoditas Perikanan Kab. Belitung

Tabel 4.7 Jenis dan Produksi Perikanan Kabupaten Belitung

No.	Jenis ikan	Jumlah (ton)				
		Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
1.	Bulat	692.19	746.37	698.20	717.37	761.11
2.	Kakap Merah	770.71	862.70	849.67	854.56	906.71
3.	Manyung	861.39	956.12	975.98	975.98	1,053.15
4.	Hiu	38.08	81.18	82.40	83.86	94.12
5.	Kerisi	2,178.26	2,181.64	2,198.84	2,207.48	2,271.05
6.	Cucut	259.78	333.25	323.56	313.47	329.66
7.	Pari	384.97	392.32	386.72	371.44	402.36
8.	Bawal	106.97	145.20	150.12	140.38	160.59
9.	Selar	1,636.40	1,610.20	1,439.20	1,579.30	1,612.33
10.	Tamban	3,759.21	3,797.07	3,670.54	3,639.64	3,686.80
11.	Banyir	261.26	337.64	312.49	313.62	341.96
12.	Belanak	144.22	257.22	261.46	243.84	267.60
13.	Ilak	46.24	73.75	60.25	51.47	67.36
14.	Ketambak	284.14	331.58	343.10	307.72	342.15
15.	Kerapu	594.03	642.88	739.80	870.79	767.18
16.	Ketarap	56.34	64.50	65.00	65.84	80.84
17.	Kembung	1,576.07	1,681.41	1,629.73	1,634.56	1,690.50
18.	Tenggiri	2,253.15	2,344.51	2,198.12	2,295.65	2,371.91
19.	Tongkol	1,750.45	1,888.28	1,920.76	1,871.84	1,920.86
20.	Teri	1,085.32	1,239.85	1,165.54	1,109.67	1,141.66
21.	Julung-julung	23.34	23.34	17.90	15.88	20.28
22.	Ekor Kuning	1,207.13	1,230.07	1,198.78	1,200.13	1,253.48
23.	Seminyak	498.61	498.61	470.23	466.27	509.34
24.	Ubur-ubur	20.36	0.00	19.80	1,300.00	311.82
25.	Laisi	1,217.56	3,717.56	3,459.00	3,602.72	3,619.02
26.	Jebung	24.64	25.43	28.93	19.67	36.51
27.	Japuh	986.37	986.37	960.00	980.41	987.36
28.	Baronang	13.56	13.55	20.75	24.55	31.09
29.	Kakap Putih	5.96	87.04	69.84	70.72	78.02
30.	Bingkis	12.99	12.10	25.00	23.99	28.79
31.	Birai	2.54	14.03	30.35	25.27	42.77
32.	Parang-parang	221.57	221.57	200.63	213.65	228.25
33.	Anjang-anjang	39.04	45.93	150.47	215.32	236.06
34.	Pisang-pisang	0.00	0.00	0.00	0.00	125.55
35.	Kuwe	0.81	0.98	2.79	1.58	4.60
36.	Bebulus	158.97	200.47	200.36	190.07	197.87
37.	Teripang	180.64	180.64	175.38	164.88	179.04
38.	Udang	1,331.22	1,338.34	1,560.77	1,318.00	1,350.26
39.	Cumi-cumi	1,836.63	1,861.21	1,950.47	1,834.65	1,901.31
40.	Kepiting/Rajungan	2,740.30	2,748.91	2,756.42	2,735.47	2,756.02
41.	Candang	0.00	0.00	0.00	12.90	27.66
42.	Kerang-kerangan	0.00	0.00	0.00	7.98	14.38
43.	Ganas	0.00	0.00	0.00	80.33	85.83
44.	Lain-lain	8,790.18	7,705.17	7,315.00	6,319.69	7,695.55
Total		38,051.60	40,878.99	40,084.35	40,472.61	41,990.76

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung (2009)

Kegiatan perikanan merupakan aktivitas kegiatan ekonomi utama bagi penduduk yang mendiami pulau-pulau di wilayah Belitung. Aktivitas kegiatan ini mempunyai prospek yang cukup baik mengingat sebagian besar produksinya untuk konsumsi ekspor yang seluruhnya dilakukan oleh masyarakat secara perorangan maupun secara kelompok.

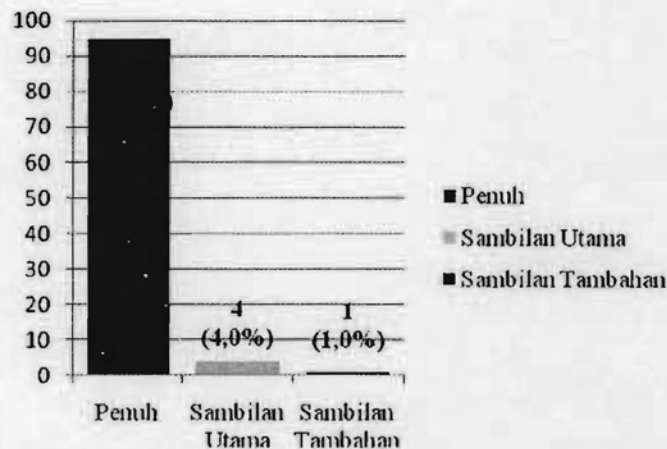
Sarana dan prasarana perikanan terdapat 21 dermaga tambat labuh yang tersebar di Kecamatan Sijuk sebanyak 5 dermaga, Kecamatan Tanjung Pandan sebanyak 3 dermaga, Kecamatan Badau sebanyak 3 dermaga, Kecamatan Membalong sebanyak 6 dermaga dan Kecamatan Selat Nasik sebanyak 4 dermaga.

Tabel 4.8 Lokasi Dermaga Ikan dan TPI Kabupaten Belitung

No.	Uraian	Lokasi	
		Desa	Kecamatan
1.	Dermaga Tambat Labuh	Sungai Padang	Sijuk
		Tanjung Binga	Sijuk
		Tanjung Binga	Sijuk
		Air Saga	Tanjung Pandan
		Pangkallalang	Tanjung Pandan
		Juru Seberang	Tanjung Pandan
		Pegantungan	Badau
		Pegantungan	Badau
		Pulau Rengit	Badau
		Pulau Seliu	Membalong
		Teluk Gembira	Membalong
		Tanjung Rusa	Membalong
		Mentigi	Membalong
		Pulau Sumedang	Membalong
		Selat Nasik	Selat Nasik
		Selat Nasik	Selat Nasik
		Suak Gual	Selat Nasik
		Petaling	Selat Nasik
		Padang Kandis	Membalong
		Keciput	Sijuk
Keciput	Sijuk		
2.	Lokasi TPI	PPN Tanjungpandan	Tanjungpandan
		PPI Selat Nasik	Selat Nasik

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung (2010)

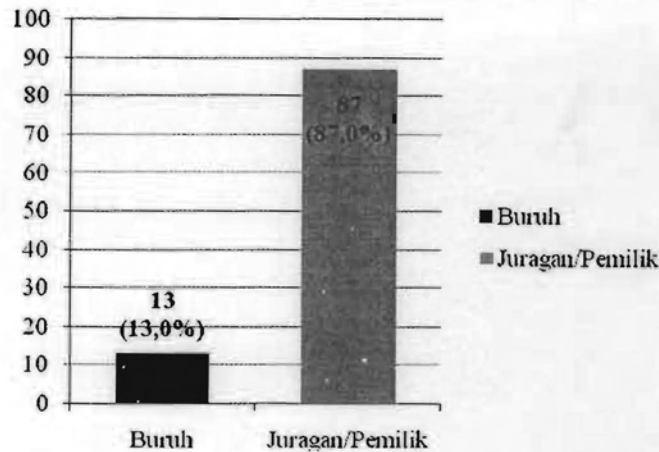
C. Deskriptif Responden



Sumber : Data Primer diolah, 2010

Gambar 4.5 Pendapatan Bekerja Sebagai Nelayan

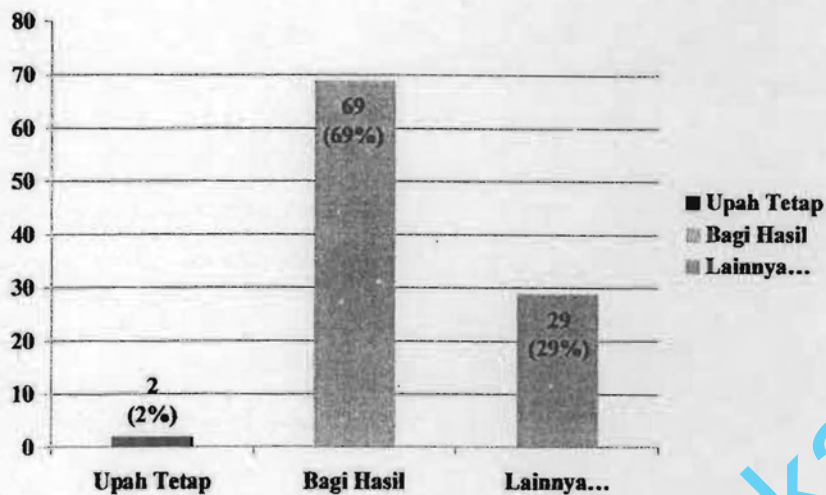
Berdasarkan gambar 4.5 untuk pertanyaan “*Berdasarkan pendapatan saudara bekerja sebagai nelayan?*”, diketahui bahwa dari 100 responden yang berprofesi sebagai nelayan di Kabupaten Belitung, sebanyak 95 responden (95%) merupakan responden yang hanya berprofesi sebagai nelayan. Sebanyak 4 responden (4%) merupakan responden yang menjadikan nelayan sebagai pekerjaan sambilan utama, sedangkan sebanyak 1 responden (1%) menjadikan profesi nelayan sebagai pekerjaan sambilan tambahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir di Kabupaten Belitung berprofesi sebagai nelayan penuh, yang mana hal tersebut dikarenakan letak geografis Kabupaten Belitung sebagai kawasan kepulauan dan kaya akan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang melimpah baik dari segi diversivitas maupun kuantitas.



Sumber : Data Primer diolah, 2010

Gambar 4.6 Status Nelayan

Berdasarkan gambar 4.6 untuk pertanyaan “apakah ststus saudara bekerja sebagai nelayan?” diketahui bahwa dari 100 responden, sebanyak 87 responden (87%) merupakan juragan/pemilik perahu dan alat-alat untuk melaut, sedangkan sebanyak 13 responden (13%) merupakan responden yang berstatus buruh atau dapat dikatakan sebagai nelayan upah, yang mana nelayan upah tersebut tidak memiliki perahu atau alat-alat melaut sehingga mereka harus menyewa atau bekerja pada juragan/pemilik perahu serta alat-alat melaut. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir yang berada di Kabupaten Belitung berstatus sebagai juragan/pemilik perahu serta peralatan untuk melaut.

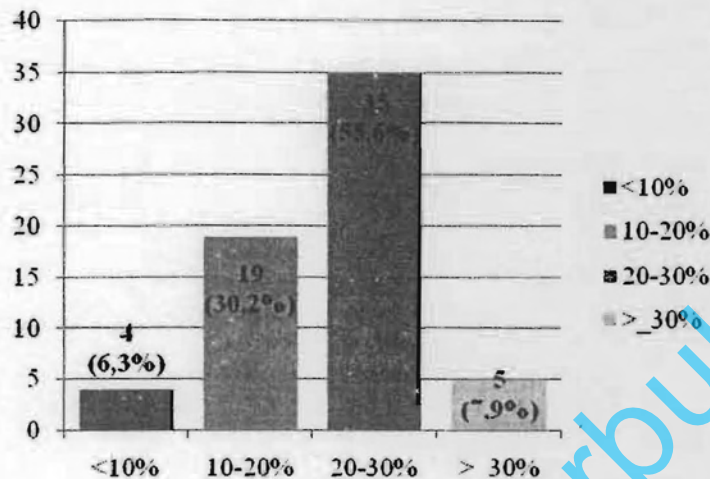


Sumber : Data Primer diolah, 2010

Gambar 4.7 Sistem Upah/Penghasilan

Berdasarkan gambar 4.7 untuk pertanyaan “*bagaimana sistem upah/penghasilan yang saudara dapat dari hasil melaut?*” diketahui bahwa dari 100 responden, sebanyak 69 responden (69,0%) merupakan nelayan yang menggunakan pembayaran hasil melaut dengan sistem bagi hasil, yang mana pada sistem bagi hasil ini adalah hasil melaut yang diperoleh nelayan dibagi hasil dengan sipemilik/juragan perahu atau nelayan lainnya. Sebanyak 29 responden (29,0%) merupakan nelayan yang menggunakan sistem lainnya dalam memperoleh upah melautnya, sedangkan sebanyak 2 responden (2,0%) menggunakan sistem upah tetap, yaitu upah yang didapat dari juragan/pemilik perahu tetap sesuai dengan kesepakatan nelayan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nelayan yang ada di pesisir Kabupaten Belitung adalah nelayan yang memiliki sistem upah bagi hasil. Dengan kata lain, sebagian besar nelayan di pesisir Kabupaten Belitung masih banyak yang belum

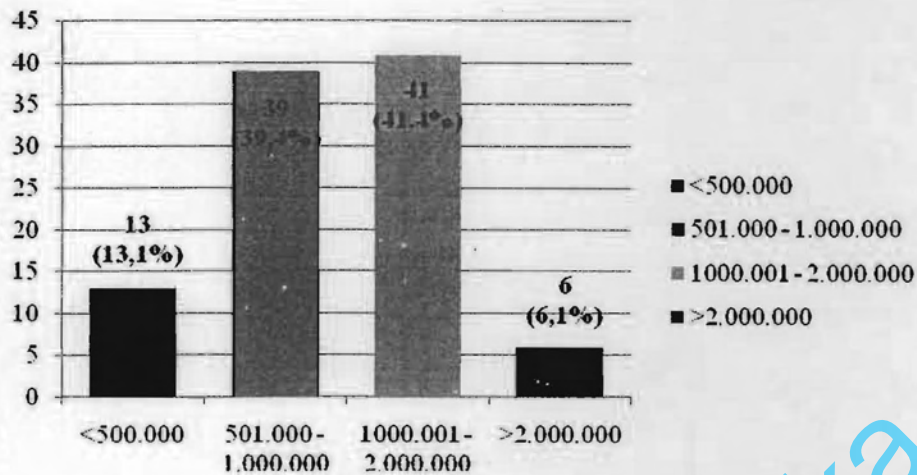
mandiri, sehingga masih sangat membutuhkan juragan atau pemilik modal yang mau/dapat meminjamkan modal untuk kebutuhan melautnya.



Sumber : Data Primer diolah, 2010

Gambar 4.8 Besar Sistem Bagi Hasil (Setelah Dikurangi Biaya Operasional)

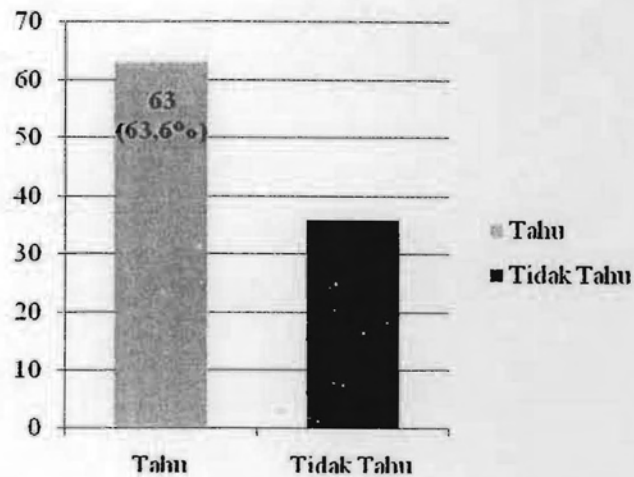
Berdasarkan gambar 4.8 untuk pertanyaan “Jika bagi hasil, berapa besarnya bagi hasil yang yang diberikan kepada saudara?” di ketahui bahwa sebanyak 35 responden (55,6%) memperoleh 20-30% pendapatannya setelah bagi hasil (dikurangi biaya operasional). Sebanyak 19 responden (30,2%) memperoleh penghasilan melaut sebesar 10-20% setelah dikurangi biaya operasional. Sebanyak 5 responden (7,9%) memperoleh penghasilan melaut lebih dari 30% setelah dikurangi biaya operasional, sedangkan sisanya sebanyak 4 responden (6,3%) memperoleh penghasilan melaut kurang dari 10% setelah dikurangi biaya operasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nelayan pesisir di Kabupaten Belitung hanya memperoleh pendapatan sebesar 10-30% dari hasil melautnya setelah dikurangi biaya operasional.



Sumber : Data Primer diolah, 2010

Gambar 4.9 Pendapatan Rata2/Bulan Sebelum Dihapusnya Retribusi

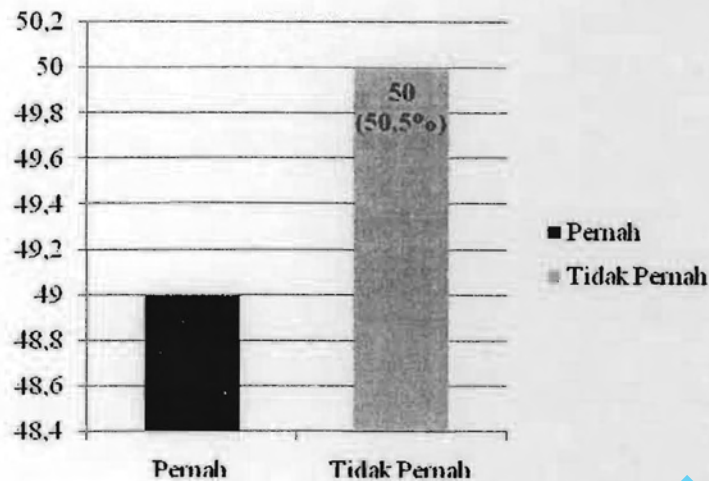
Berdasarkan hasil pada gambar 4.9 untuk pertanyaan “*Berapakah pendapatan rata-rata saudara perbulan berdasarkan hasil penangkapan ikan sebelum dihapusnya retribusi?*” diketahui bahwa sebanyak 41 responden (41,4%) memiliki pendapatan rata-rata perbulan sebesar 1.000.000 sampai 2.000.000 rupiah sebelum dihapusnya retribusi atau iuran. Sebanyak 39 responden (39,4%) memperoleh pendapatan per bulan sebesar 500.000 sampai 1.000.000 rupiah sebelum dihapusnya retribusi atau iuran. Sebanyak 13 responden (13,1%) memperoleh pendapatan rata-rata per bulan kurang dari 500.000 rupiah sebelum dihapusnya retribusi atau iuran, sedangkan sebanyak 6 responden (6,1%) memperoleh pendapatan rata-rata per bulan diatas/lebih dari 2.000.000 rupiah sebelum dihapusnya retribusi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nelayan pesisir di Kabupaten Belitung memperoleh pendapatan sebesar 500.000 sampai 2.000.000 rupiah per bulan pada saat belum dihapusnya retribusi atau iuran perikanan.



Sumber : Data Primer diolah, 2010

Gambar 4.10 Pengetahuan Tentang Tiga Retribusi

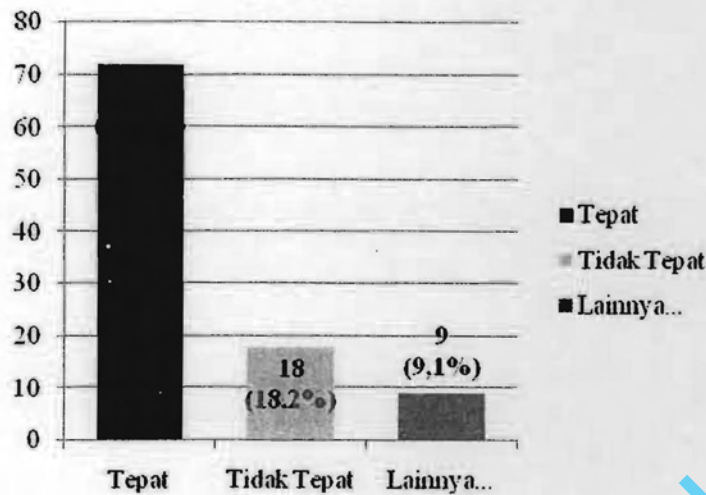
Berdasarkan gambar 4.10 untuk pertanyaan “Ada tiga jenis retribusi yang dipungut kepada nelayan di Kabupaten Belitung yaitu 1) retribusi pelelangan 2) retribusi pengiriman ikan, dan 3) retribusi tambat labuh. Apakah saudara mengetahui tentang retribusi tersebut?” diperoleh bahwa sebanyak 63 responden (63,6%) mengetahui tentang 3 retribusi tersebut yang dibebankan kepada mereka, sedangkan sisanya sebanyak 36 responden (36,4%) tidak mengetahui tentang 3 retribusi yang dibebankan kepada mereka. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar nelayan pesisir di Kabupaten Belitung sudah mengetahui tentang retribusi perikanan yang dibebankan pada mereka.



Sumber : Data Primer diolah, 2010

Gambar 4.11 Pernah/Tidaknya Membayar Retribusi

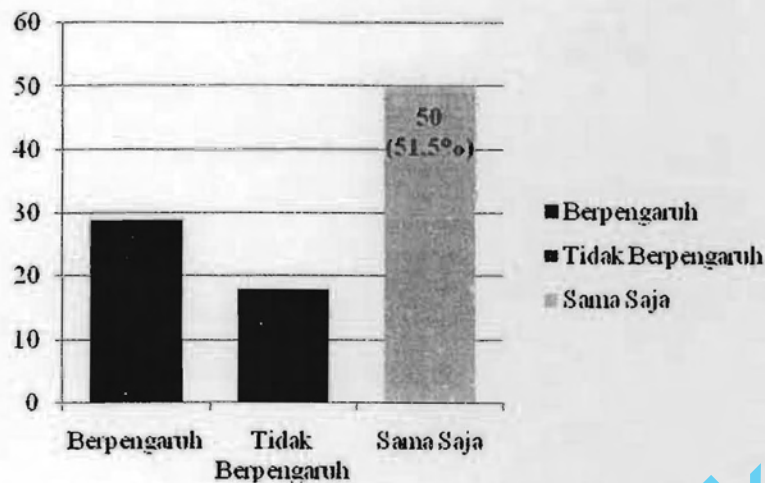
Berdasarkan gambar 4.11 untuk pertanyaan “Pernahkah saudara dipungut/membayar retribusi tersebut?”, diketahui bahwa sebanyak 50 responden (50,5%) tidak pernah membayar retribusi, sedangkan sebanyak 49 responden (49,5%) pernah membayar retribusi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden tidak pernah membayar retribusi. Hal ini dikarenakan para nelayan merasa keberatan dengan retribusi yang dibebankan kepada mereka, yang mana biaya tersebut tetap harus mereka bayarkan meskipun tidak dapat melaut yang dikarenakan cuaca buruk. Semestinya biaya retribusi yang mereka bayarkan sudah termasuk dana yang dapat mereka ambil sebagian pada saat mengalami paceklik.



Sumber : Data Primer diolah, 2010

Gambar 4.12 Pendapat Dihapuskannya Retribusi

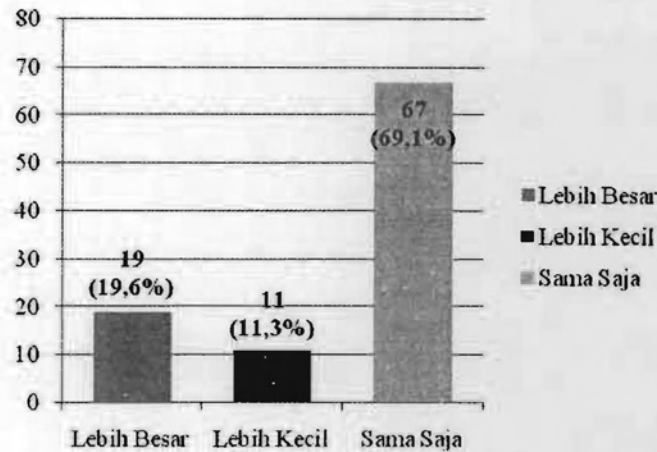
Berdasarkan gambar 4.12 untuk pertanyaan “Apakah menurut saudara kebijakan penghapusan retribusi terhadap nelayan di Kabupaten Belitung sudah tepat?” diketahui bahwa sebanyak 72 responden (72,7%) berpendapat bahwa penghapusan retribusi perikanan yang dibebankan pada nelayan dinilai sangat tepat, sedangkan sisanya sebanyak 18 responden (18,2%) berpendapat bahwa retribusi perikanan yang dibebankan pada nelayan dinilai tidak tepat, sedangkan sisanya sebanyak 9 responden (9,1%) memiliki pendapat lainnya tentang dihapuskannya retribusi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa penghapusan retribusi perikanan yang dibebankan kepada nelayan dinilai tepat. Hal ini dikarenakan para nelayan belum merasakan terbantu dengan adanya biaya retribusi pada saat paceklik karena cuaca buruk yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaut.



Sumber : Data Primer diolah, 2010

**Gambar 4.13 Penghapusan Retribusi
(Pengaruh/Tidak Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan)**

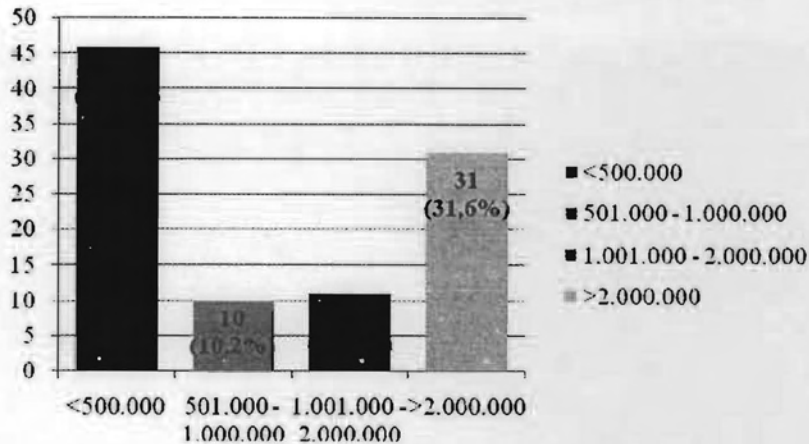
Berdasarkan gambar 4.13 untuk pertanyaan “*Bagaimana menurut saudara apakah kebijakan penghapusan retribusi terhadap nelayan di kabupaten Belitung berpengaruh pada peningkatan pendapatan nelayan?*” diketahui bahwa sebanyak 50 responden (51,5%) menyatakan bahwa dihapuskan atau tidaknya retribusi pada nelayan akan berdampak sama saja. Sebanyak 29 responden (29,9%) menyatakan bahwa penghapusan retribusi perikanan yang dibebankan pada nelayan sangat mempengaruhi pendapatan mereka, sedangkan sisanya sebanyak 18 responden (18,6%) menyatakan bahwa penghapusan retribusi tidak mempengaruhi pendapatan mereka. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan bahwa dihapuskan atau tidaknya retribusi perikanan yang dibebankan pada nelayan pesisir di Kabupaten Belitung tidak mengurangi atau menambahkan pendapatan mereka dari hasil melaut.



Sumber : Data Primer diolah, 2010

Gambar 4.14 Lebih Besar/Kecil Hasil Pendapatan Saat Ini Dengan Sebelum Dihapusnya Retribusi

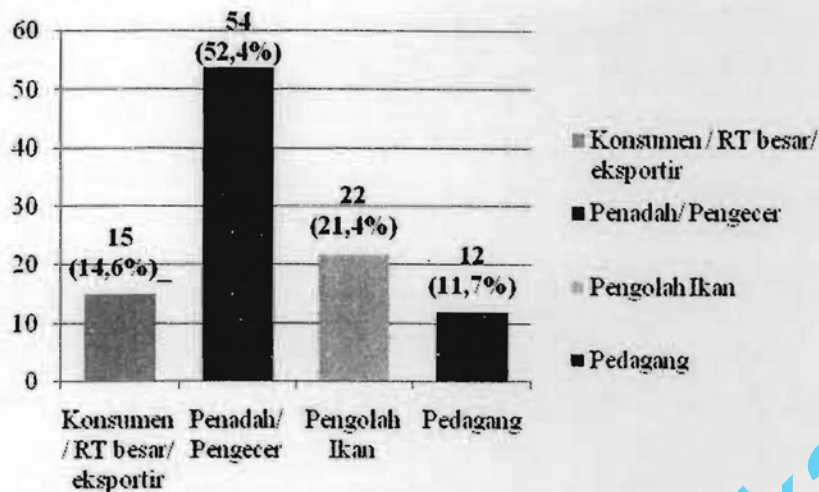
Berdasarkan gambar 4.14 untuk pertanyaan “*Bagaimana pendapatan saudara sekarang, bila dibandingkan sebelum dihapusnya retribusi perikanan di Kabupaten Belitung?*” sebanyak 67 responden (69,1%) menyatakan bahwa pendapatannya sama saja antara sebelum dan sesudah dihapuskannya retribusi. Sebanyak 19 responden (19,6%) menyatakan bahwa setelah dihapuskannya retribusi perikanan yang dibebankan pada nelayan, mereka merasa pendapatannya lebih besar, sedangkan sisanya sebanyak 11 responden (11,3%) menyatakan bahwa pendapatannya lebih kecil setelah dilakukan penghapusan retribusi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar nelayan pesisir di Kabupaten Belitung menyatakan bahwa dihapuskan atau tidak retribusi perikanan yang dibebankan kepada mereka, tidak berpengaruh sama sekali terhadap pendapatannya perbulan dari hasil melaut.



Sumber : Data Primer diolah, 2010

Gambar 4.15 Biaya (Modal Kerja) Rata-Rata yang Diperlukan untuk Sekali Melaut

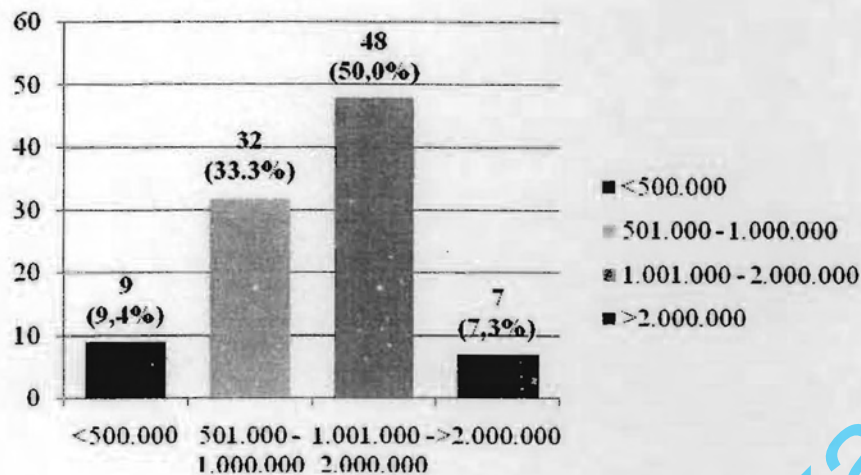
Berdasarkan gambar 4.15 untuk pertanyaan "Berapa biaya (modal kerja) rata-rata yang diperlukan untuk pergi sekali melaut/trip?" diketahui bahwa sebanyak 46 responden (46,9%) menyatakan bahwa mereka menghabiskan biaya kurang dari 500.000 rupiah untuk sekali melaut. Sebanyak 31 responden (31,6%) menyatakan bahwa mereka menghabiskan dana lebih dari 2.000.000 rupiah untuk sekali melaut. Sebanyak 11 responden (11,2%) menyatakan bahwa mereka menghabiskan dana sebesar 1.000.000 rupiah hingga 2.000.000 rupiah untuk sekali melaut, sedangkan sisanya sebanyak 10 responden (10,2%) mereka menghabiskan dana sebesar 500.000 rupiah hingga 1.000.000 rupiah untuk sekali melaut. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar nelayan pesisir di Kabupaten Belitung menghabiskan dana sekurang-kurangnya sebesar 500.000 rupiah dan sebesar-besarnya lebih dari 2.000.000 rupiah.



Sumber : Data Primer diolah, 2010

Gambar 4.16 Kemana Menjual Hasil Tangkapan

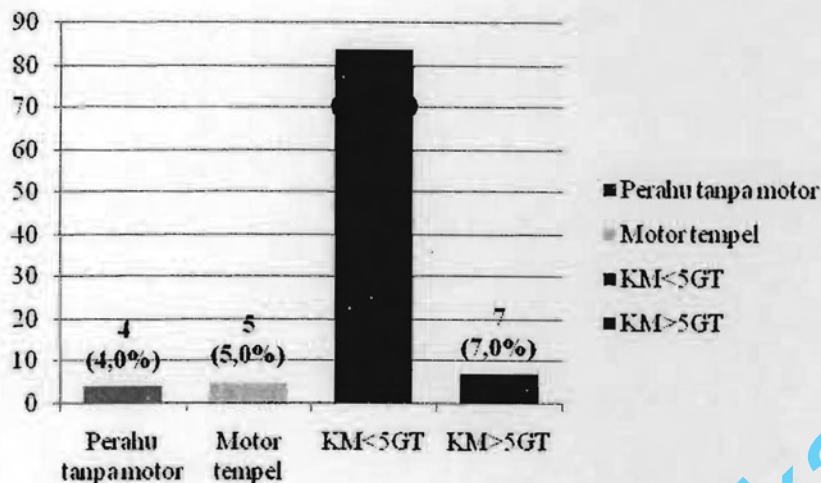
Berdasarkan pada gambar 4.16 untuk pertanyaan “*Berkaitan dengan tata niaga/penjualan, kemana saudara menjual hasil tangkapan ikan?*” dapat diketahui bahwa sebanyak 54 responden (52,4%) menyatakan bahwa mereka menjual hasil tangkapannya kepada para penadah/pengecer. Sebanyak 22 responden (21,4%) menyatakan bahwa mereka menjual setiap hasil tangkapannya dari melaut kepada pengolah ikan. Sebanyak 15 responden (14,6%) menyatakan bahwa mereka lebih memilih menjual hasil tangkapan mereka kepada konsumen langsung/RT besar/eskportir, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 12 responden (11,7%) menyatakan bahwa mereka lebih memilih menjual hasil tangkapannya langsung kepada para pedagang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa lebih memilih menjual hasil tangkapan mereka kepada penadah/pengecer dibanding ke konsumen/RT besar/eksportir/pengolah ikan/ pedagang langsung.



Sumber : Data Primer diolah, 2010

Gambar 4.17 Rata-Rata Pendapatan/Bulan Setelah Dihapus Retribusi

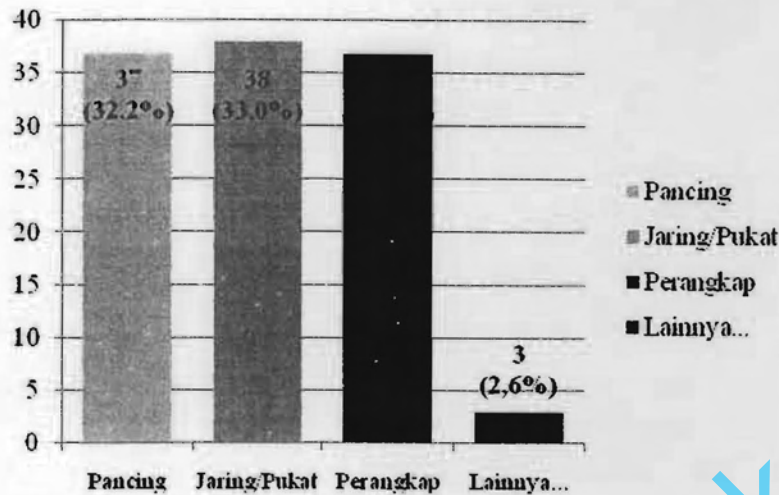
Berdasarkan pada gambar 4.17 untuk pertanyaan “Berapakah pendapatan rata-rata saudara perbulan berdasarkan hasil penangkapan ikan setelah dihapusnya retribusi:” dapat diketahui bahwa sebanyak 48 responden (50,0%) menyatakan bahwa rata-rata pendapatan mereka perbulan setelah dihapusnya retribusi mencapai 1.001.000 rupiah hingga 2.000.000 rupiah. Sebanyak 32 responden (33,3%) menyatakan bahwa rata-rata pendapatan mereka perbulan setelah dihapusnya retribusi menjadi 500.000 ribu hingga 2.000.000 rupiah. Sebanyak 9 responden (9,4%) menyatakan bahwa rata-rata pendapatan perbulan mereka kurang dari 500.000 rupiah setelah dilakukan penghapusan retribusi, sedangkan sisanya sebanyak 7 responden (7,3%) menyatakan bahwa rata-rata pendapatan perbulan mereka lebih besar dari 2.000.000 rupiah setelah dilakukan penghapusan retribusi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara sebelum dilakukan dan sesudah dilakukan penghapusan retribusi.



Sumber : Data Primer diolah, 2010

Gambar 4.18 Jenis Perahu

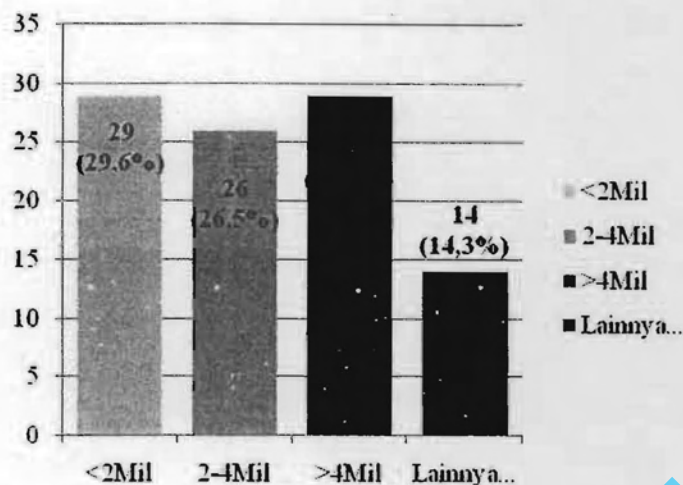
Berdasarkan pada gambar 4.18 untuk pertanyaan “Jenis perahu/kapal motor apa yang saudara gunakan untuk melaut?” diketahui bahwa sebanyak 84 responden (84,0%) menggunakan kapal motor dengan kapasitas lebih besar dari 5 GT. Sebanyak 7 responden (7,0%) menggunakan kapal motor dengan kapasitas lebih kecil dari 5 GT. Sebanyak 5 responden (5,0%) menggunakan perahu dengan motor tempel, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 4 responden (4,0%) menggunakan perahu tanpa motor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nelayan pesisir di Kabupaten Belitung sebagian besar sudah menggunakan kapal motor sebagai armada penangkapan untuk melaut.



Sumber : Data Primer diolah, 2010

Gambar 4.19 Jenis Alat Tangkap

Berdasarkan gambar 4.19 untuk pertanyaan “*Jenis alat tangkap apa yang saudara gunakan untuk menangkap ikan di laut?*” dapat diketahui bahwa sebanyak 38 responden (32,2%) menggunakan jaring/pukat sebagai alat tangkap dalam melaut. Kemudian penggunaan alat pancing dan perangkap sebagai alat tangkap dalam melaut, masing-masing sebanyak 37 responden (32,2%), sedangkan sebanyak 3 responden (2,6%) menggunakan peralatan lain pada saat menangkap ikan/melaut. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar nelayan pesisir di Kabupaten Belitung masih menggunakan alat-alat tradisional seperti alat pancing, jaring/pukat, dan perangkap.



Sumber : Data Primer diolah, 2010

Gambar 4.20 Jarak yang Ditempuh Ke Daerah Sasaran Melaut

Berdasarkan gambar 4.20 untuk pertanyaan “*Jika saudara melaut, berapa jarak yang saudara tempuh ke daerah sasaran tangkapan (fishing ground)?*” dapat diketahui bahwa jarak yang ditempuh ke daerah sasaran melaut sekitar kurang dari 2 mil dan lebih dari 4 mil, masing-masing sebanyak 29 responden (29,6%). Sebanyak 26 responden (26,5%) menempuh jarak sekitar 2 hingga 4 mil ke daerah sasaran melautnya, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 14 responden (14,3%) menempuh jarak lainnya yang mungkin bisa lebih atau kurang dari jarak tempuh yang disebutkan di atas. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar nelayan pesisir di Kabupaten Belitung melaut sejauh kurang dari 2 mil hingga lebih dari 4 mil.

D. Hasil Uji Regresi Beda Dua Rata-Rata

Tabel 4.9 Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	sebelum dihapusnya retribusi – sesudah dihapusnya retribusi	-.10526	.67593	.06935	-.24296	.03243	-1.518	94	.132

Ho1 = Tidak terdapat perbedaan antara pendapatan rata-rata nelayan sebelum dan sesudah penghapusan retribusi

Ha1 = Terdapat perbedaan antara pendapatan rata-rata nelayan sebelum dan sesudah penghapusan retribusi

Merujuk pada tabel di atas, hasil pengujian hipotesis uji beda dua rata-rata variabel rata-rata pendapatan nelayan sebelum dan sesudah dihapusnya retribusi menghasilkan nilai *P Value* sebesar 0.132 dengan nilai lebih besar dari alpha 0.05. Dengan demikian Ha1 ditolak dan Ho1 diterima dalam penelitian ini, oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa terbukti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan rata-rata nelayan di Kabupaten Belitung sebelum dan sesudah penghapusan retribusi. Atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan pada pendapatan rata-rata nelayan baik sesudah maupun sebelum penghapusan retribusi.

E. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada atau tidaknya penghapusan retribusi baik retribusi pelelangan, retribusi pengiriman ikan, dan retribusi tambat labuh yang dibebankan kepada para nelayan pesisir di Kabupaten Belitung tidak mempengaruhi jumlah rata-rata pendapatan para nelayan perbulannya serta tidak meningkatkan atau mengubah kesejahteraan nelayan-nelayan tersebut. Hal ini dikarenakan tarif retribusi memang memiliki porsi yang sangat kecil dibandingkan dengan total biaya operasional yang dikeluarkan oleh nelayan. Besarnya tarif retribusi untuk tambat/labuh, sebagian besar nelayan hanya dibebani Rp. 1.000 untuk sekali tambat/labuh, sehingga nelayan hanya membayar sebesar Rp. 30.000 pada setiap bulannya. Tarif retribusi pengiriman atau pengangkutan ikan sebesar 2,5% dikalikan produktivitas dikalikan harga patokan ikan dibebankan pada juragan atau pengusaha yang mengirimkan ikan keluar daerah, pada pelaksanaannya juragan atau pengusaha membebankannya pada nelayan, akan tetapi setelah penghapusan retribusi tersebut tidak meningkatkan bagi hasil dan harga jual yang bisa dinikmati oleh nelayan. Sedangkan retribusi pelelangan hasil perikanan dibebankan pada penjual (nelayan) sebesar 3% dan pembeli (bakul) 3%, akan tetapi pelelangan tidak berjalan disebabkan oleh tempat pendaratan kapal nelayan tersebar di seluruh pesisir di Kabupaten Belitung tidak terpusat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang memiliki tempat pelelangan ikan, sebagian besar nelayan melakukan penangkapan hanya satu hari melaut (*one day fishing*), menurunkan mutu ikan-ikan kualitas ekspor. Oleh karena itu pendapatan nelayan tidak terpengaruh dengan ada atau tidaknya retribusi,

untuk itu untuk meningkatkan pendapatan nelayan pemerintah perlu melakukan upaya lain, seperti mewajibkan pemerintah daerah melakukan kontrak produksi dengan nelayan atas produksi ikan yang dihasilkan, memberikan bantuan pendanaan untuk kesejahteraan nelayan seperti perbaikan rumah nelayan dan pemberian beasiswa pendidikan kepada anak nelayan.

Selain masalah retribusi, nelayan juga dibebani oleh biaya operasional yang cukup besar serta sistem bagi hasil yang harus mereka lakukan kepada para juragan/pemilik perahu maupun nelayan lainnya. Sistem bagi hasil ini dapat terjadi karena sebagian nelayan di Kabupaten Belitung merupakan nelayan buruh. Dari penghasilan melaut mereka dipotong sebesar 20% hingga 30% oleh pemilik perahu atau pemilik modal, potongan tersebut belum termasuk dengan biaya operasional yang harus mereka keluarkan untuk melaut, sehingga penghapusan biaya retribusi yang dibebankan kepada mereka tidaklah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan serta kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Belitung.

Peningkatan pendapatan nelayan serta kesejahteraannya dapat diupayakan dengan memberikan insentif dengan cara kemudahan dalam melakukan pengembangan usaha seperti perizinan, subsidi, pinjaman, dan menjaga kestabilan harga jual hasil laut. Dengan adanya kemudahan dalam pemberian pengembangan usaha, nelayan akan merasa terbantu dalam biaya operasional karena mereka memerlukan setidaknya Rp. 2.000.000 untuk sekali melaut. Biaya ini ditambah lagi untuk mendapatkan minyak harus antri lama-lama di Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN), sedangkan kalau membeli eceran harganya cukup mahal, yakni mencapai di atas Rp. 7.000,- di tingkat pedagang eceran, sedangkan bagi nelayan

yang tetap melaut terpaksa minyaknya dibagi-bagi sekitar dua liter per kapal. Hal ini sangat menyulitkan para nelayan di Kabupaten Belitung, sedangkan penghasilan bersih nelayan setelah harga bahan bakar minyak (BBM) naik, rata-rata hanya mencapai Rp. 20.000,-/hari. Adapun upaya yang dilakukan oleh para nelayan yaitu dengan mengusulkan agar pemerintah desa mengajukan surat permohonan ke kecamatan agar nelayan di Kabupaten Belitung dapat diprioritaskan untuk mendapatkan solar dari SPDN, atau mengusulkan untuk pendirian SPDN di sentra-sentara nelayan, sehingga tidak perlu membeli di pedagang eceran yang harganya terbilang cukup mahal. Kemudian hal lain yang diperoleh nelayan dengan diberikannya kemudahan untuk memperoleh perizinan, subsidi, pinjaman modal usaha serta batuan lainnya yang dapat mendukung kelangsungan mereka dalam melaut. Untuk memberikan perubahan positif terhadap pendapatan serta kesejahteraan hidup para nelayan di Kabupaten Belitung dapat memberikan modal yang cukup kepada nelayan sehingga mereka dapat memiliki perahu dan alat tangkap sendiri dan tidak menjadi buruh nelayan, buruh nelayan tidak pernah mendapatkan penghasilan penuh atas setiap hasil tangkapan mereka, harus memberikan 20% hingga 30% pendapatannya (belum termasuk biaya operasional) kepada pemilik perahu/juragan. Dengan dipermudahnya pemberian subsidi serta pinjaman, diharapkan dapat mengubah pendapatan nelayan kearah yang lebih baik serta keterjaminan kesejahteraan nelayan-nelayan di Kabupaten Belitung tersebut. Tidak hanya pemberian insentif, akan tetapi pemerintah daerah juga perlu melakukan pendekatan aktivitas sekunder seperti budidaya tambak dan budidaya rumput laut. Hal ini perlu

dilakukan oleh pemerintah daerah guna memberikan alternatif lain pada para nelayan jika keadaan angin/cuaca dilaut sedang buruk atau masa paceklik. Pada kondisi buruk nelayan bisa tetap mendapatkan penghasilan lain diluar penghasilan dari melaut serta menambah wawasan nelayan dalam memperoleh penghasilan dan menjaga kelestarian biota laut. Adapun cara-cara lain dalam mengupayakan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan nelayan di Kabupaten Belitung yang antara lain dengan meningkatkan kualitas teknologi penangkapan yang ramah lingkungan, relevan dengan kondisi perairan serta dapat mengatasi tantangan alam dan dukungan fasilitas yang memadai, meningkatkan akses informasi nelayan terhadap layanan peta lokasi yang mempunyai potensi ikan, mengembangkan fungsi lembaga keuangan mikro dan koperasi yang memihak nelayan, mengurangi beban utang piutang yang kompleks para nelayan kepada pemilik perahu dan tengkulak serta memperbaiki norma sistem bagi hasil dalam organisasi penangkapan yang bertujuan untuk tidak merugikan nelayan. Dengan diberlakukannya hal-hal tersebut, diharapkan dapat membantu perekonomian nelayan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Belitung.

1. Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan Kabupaten Belitung

Deskripsi pada bagian terdahulu telah menggambarkan bahwa pendapatan nelayan Kabupaten Belitung memang belumlah optimal dan hal ini tentu saja bersangkutan langsung dengan kesejahteraan nelayan pada umumnya. Belum optimalnya pendapatan nelayan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh nelayan mengharuskan adanya pemetaan (*mapping*) keberadaan nelayan sebagai suatu

bidang pekerjaan, mata pencaharian dan sebagai suatu profesi serta hal-hal yang bersangkutan dengan itu.

Nelayan sebagai suatu bidang pekerjaan pada dasarnya adalah suatu mata pencaharian atau bidang usaha yang digunakan seseorang untuk mencari nilai tambah dari usaha yang dilakukannya terutama nilai tambah ekonomi. Melalui mata pencaharian yang ditekuni dalam waktu yang cukup lama, dimungkinkan seseorang untuk memperoleh nafkah ekonomi guna memenuhi kebutuhan ekonomi diri dan keluarganya.

Nelayan sebagai suatu bidang pekerjaan dimungkinkan pula untuk dimunculkan sebagai suatu profesi atau bidang pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang sepanjang hidupnya dan untuk melaksanakannya memang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Sebagai suatu profesi, nelayan memang merupakan pekerjaan dan mata pencaharian yang dilakukan seseorang sepanjang hidupnya selagi masih mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk melaksanakannya.

Masih cukup sukar bagi seseorang yang telah menekuni profesi sebagai nelayan untuk pindah ke profesi lain apalagi yang tidak bersangkutan dengan perairan dan laut. Suksesnya seorang nelayan biasanya hanya berganti peran dari sekedar buruh nelayan menjadi nelayan juragan atau juragan pemilik alat tangkap serta menjadi pedagang atau pengusaha sektor perikanan. Hal ini semakin membenarkan bahwa sektor perikanan laut sebagai mata pencaharian adalah mata pencaharian yang penuh kekakuan dalam arti tidaklah mudah bagi seseorang untuk meninggalkannya atau berpindah ke sektor lainnya.

Pemetaan lanjutan terhadap kehidupan sosial ekonomi nelayan berdasarkan deskripsi terdahulu juga memperlihatkan bahwa profesi sebagai nelayan adalah profesi yang memiliki aneka kerentanan (*vulnerability*) dan dengan tingkat elastisitas (*elasticity*) tertentu. Kerentanan adalah situasi yang harus diterima oleh sesuatu objek apa adanya karena objek tersebut tidak mungkin untuk menghindar dari situasi yang dihadapinya, atau bila disederhanakan kerentanan adalah situasi yang cukup sukar untuk dikondisikan oleh pihak yang mengalaminya.

Berbeda dengan kerentanan yang berkonotasikan sebagai faktor eksternal yang berpengaruh terhadap sesuatu objek, maka elastisitas adalah faktor internal sesuatu objek yang melakukannya. Elastisitas merupakan alternatif kemungkinan untuk terjadinya pembesaran ataupun pengecilan sesuatu objek yang dapat dilakukan oleh sesuatu subjek tersendiri.

Profesi sebagai nelayan memang memiliki kerentanan tersendiri seperti kerentanan terhadap kemampuan fisik para nelayan itu sendiri. Melaksanakan profesi sebagai nelayan membutuhkan kemampuan fisik yang prima karena harus berhadapan dengan laut yang tidaklah selamanya bersahabat untuk senantiasa diaruhi oleh nelayan. Nelayan yang melaut juga menghadapi kerentanan sumberdaya alam yang akan diambilnya yaitu hasil laut karena sukar untuk memastikan bahwa ketersediaannya pada lokasi dan tempat tertentu dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Kerentanan nelayan dalam melaksanakan profesinya tidak hanya kerentanan kemampuan fisik nelayan dan kerentanan ketersediaan sumberdaya alam semata, yang berakumulasi sebagai kerentanan selama melaksanakan aktivitas melaut.

Kerentanan nelayan juga terjadi sebelum melaksanakan aktivitas melaut serta setelah selesai melakukan aktivitas melaut atau setelah kembali sampai ke daratan dari melaut.

Sebelum melaut, nelayan menghadapi kerentanan peralatan tangkap yang dapat digunakan termasuk bahan bakar yang dibutuhkan untuk motor yang akan digunakan nelayan. Disebut sebagai kerentanan karena situasi menghendaki bahwa keberadaan alat tangkap dan bahan bakar untuk menggerakkan motor yang akan dipergunakan nelayan untuk melaut hampir keseluruhannya berada diluar kendali para nelayan itu sendiri.

Sesudah melaut atau setelahnya kembali lagi ke darat maka para nelayan juga menghadapi situasi yang tidak dapat dikondisikannya atau kerentanan untuk memasarkan hasil tangkapannya. Besarnya imbalan atau harga beli hasil tangkapan nelayan untuk sebagian besarnya ditentukan oleh pihak diluar dirinya terutama nelayan yang telah terjat hutang kepada para pedagang tertentu.

Mekanisme pasar untuk hasil tangkapan para nelayan yang sukar untuk disimpannya dalam waktu yang relatif lama, merupakan mekanisme pasar yang seakan-akan mengeksploitasi para nelayan untuk menerima saja harga jual dari hasil tangkapannya. Apalagi untuk para nelayan yang belum memiliki organisasi untuk melakukan pemasaran hasil tangkapannya, maka nelayan berada pada pihak yang lemah untuk melakukan penentuan harga hasil tangkapan nelayan.

Kehidupan nelayan sebagai mata pencaharian sektor primer dalam kehidupan sosial ekonomi juga memiliki tingkat elastisitas (*elasticity*) tertentu. Nelayan disebutkan sebagai mata pencaharian sektor pimer karena sepenuhnya

mata pencaharian itu bersumberkan dari ketersediaan sumber daya alam yang telah dipersiapkan untuk dimanfaatkan oleh manusia.

Nelayan bukanlah pihak yang turut serta membesarkan hasil laut yang akan dipanen atau ditangkapnya karena untuk sebagian besarnya sumberdaya laut adalah sumberdaya yang berkembang sesuai dengan naluriahnya semata. Karena itulah disebutkan bahwa mata pencaharian sebagai nelayan adalah mata pencaharian sektor primer, yang melakukan pemungutan hasil sumberdaya alam tanpa ikut serta secara langsung untuk mempersiapkan sumberdaya yang akan dikumpulkan untuk dimanfaatkan atau dipasarkannya.

Secara sosial ekonomi, kehidupan nelayan adalah kehidupan dengan elastisitas beragam. Karena elastisitas merupakan alternatif kemungkinan untuk terjadinya pembesaran ataupun pengecilan sesuatu objek yang dapat dilakukan oleh sesuatu subjek tersendiri, maka nelayan sebagai lapangan pekerjaan merupakan lapangan kerja yang memiliki elastisitas yang tinggi.

Lapangan pekerjaan yang memiliki elastisitas yang tinggi berarti bahwa lapangan kerja itu relatif tidaklah akan mengenal jumlah tenaga kerja yang berlebih atau mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Nelayan adalah lapangan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh banyak orang sepanjang orangnya memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai nelayan.

Profesi nelayan disebutkan sebagai profesi dengan elastisitas tinggi karena nilai tambah dari profesi ini demikian mudah membesar dan mengecilnya dan bahkan hampir tidak dapat diprediksikannya. Seseorang nelayan yang melaut

relatif tidaklah dapat memastikan besaran kuantitas dan kualitas hasil tangkapannya menjadi pertanda bahwa nelayan sebagai profesi memiliki elastisitas yang tinggi.

Berbeda dengan nelayan sebagai lapangan pekerjaan dan sebagai profesi, nelayan sebagai mata pencaharian mempunyai elastisitas yang rendah atau sempit. Hal ini dibenarkan oleh data deskriptif yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan di Kabupaten Belitung adalah nelayan yang bermata pencaharian tunggal atau nelayan monokultur. Nelayan bermata pencaharian tunggal ini berarti bahwa sang nelayan hanyalah memiliki mata pencaharian satu-satunya yaitu nelayan. Apabila mata pencaharian ini mengalami pasang surut atau tidak menghasilkan maka nelayan itu akan ketiadaan pendapatan pula.

Ketergantungan dengan satu mata pencaharian merupakan ciri khas sebagian besar nelayan Kabupaten Belitung, baik yang berposisi sebagai buruh nelayan ataupun nelayan pemilik. Kondisi seperti ini merupakan basis lokal nelayan yang harus ditimbang utuh bersamaan dengan berbagai basis lainnya yang juga harus dipertimbangkan untuk melakukan langkah berikutnya kearah peningkatan pendapatan nelayan.

Disamping basis lokal diatas, ternyata nelayan Kabupaten Balitung juga telah terpola oleh basis kemitraan yang harus diturutinya. Basis kemitraan nelayan adalah mitra nelayan yang harus tetap dipelihara dan dijaganya untuk adanya keterjaminan pekerjaannya sebagai nelayan.

Dengan jumlah armada penangkapan sebanyak 2.561 buah dan jumlah nelayannya sebanyak 9.455 orang terlihat bahwa satu armada penangkapan membutuhkan rata-rata hampir empat orang nelayan untuk setiap armada penangkapan. Artinya armada penangkapan tetap membutuhkan nelayan sebagai awaknya lebih dari satu orang.

Adanya kebutuhan akan nelayan yang menjadi awak armada penangkapan menghadirkan adanya kemitraan antara nelayan pemilik armada dengan para nelayan yang berstatus nelayan buruh. Untuk hal ini tentu telah terjadi usaha kemitraan antara nelayan pemilik armada dengan nelayan buruhnya, sehingga nelayan pemilik seringkali menjadi pihak yang senantiasa mengusahakan adanya ketergantungan nelayan buruh terhadap armada penangkapan yang dipunyai oleh nelayan pemilik.

Untuk pemasaran hasil melaut, nelayan juga memiliki kemitraan tertentu dengan mitra pemasaran hasil laut tersebut. Karena sebagian besar hasil tangkapan dijual kepada penadah dan pengecer terlihat bahwa nelayan melakukan hal itu tentulah karena adanya hubungan yang telah terbentuk sebelumnya. Belum banyaknya nelayan menjual hasil tangkapan kepada eksportir dan pengolah ikan menunjukkan bahwa telah terjadi relasi tertentu antara penadah atau pengecer dengan nelayan tersebut.

Basis kemitraan dalam kehidupan sosial ekonomi nelayan pantas didalami karena hampir dapat dipastikan bahwa nelayan adalah profesi yang suatu saat memiliki kendala untuk dilakukan seperti adanya musim laut yang kurang bersahabat dengan nelayan. Dalam istilah sehari-hari disebutkan sebagai musim

panceklik nelayan dan pada saat tersebut tentu saja nelayan tidak memiliki pendapatan karena tidak mungkin melaut.

Pada kondisi seperti inilah tampaknya kemitraan yang cenderung eksploitatif terjadi antara penadah dengan nelayan. Nelayan yang tetap membutuhkan pendapatan selama tidak melaut menjadi sasaran eksploitasi oleh para penadah dalam kemitraan antara dirinya dengan para nelayan.

Belum cukup dan ketiadaan tabungan para nelayan terutama untuk menghadapi masa panceklik untuk melaut, juga berkaitan dengan besaran pendapatan nelayan itu sendiri pada bulan-bulan melaut. Besaran pendapatan yang cukup lumayan yaitu antara 500.000 rupiah sampai 2.000.000 rupiah sebulan sebenarnya masih cukup lumayan bila pendapatan itu dikelola dengan baik. Tetapi disinyalir bahwa pengelolaan pendapatan yang dilakukan nelayan belumlah sebagaimana yang diharapkan.

Belum adanya pengelolaan pendapatan yang baik oleh nelayan merupakan dimensi sosial yang harus didalami dari sisi kebiasaan sampai dengan budaya berkonsumsi. Kebiasaan dan budaya yang cenderung konsumtif dikalangan nelayan merupakan keseharian yang sering dilakukan nelayan tatkala memperoleh pendapatan yang mencukupi. Hal ini merupakan kerangka fikir nelayan yang seringnya menyatakan selagi masih ada laut maka masih ada sumber pendapatan, menjadikan pendapatan dihabiskan untuk hal-hal yang konsumtif.

Tidaklah terlalu mudah untuk mengubah pola pikir (*mind set*) dalam melakukan pengelolaan pendapatan apalagi oleh para nelayan. Karena berapa pun besarnya pendapatan tanpa adanya pengelolaan pendapatan yang baik maka

pendapatan itu akan cenderung digunakan untuk hal-hal yang konsumtif dan tidak mengingati adanya kemungkinan tidak berpendapatan suatu saat. Karena itulah dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh untuk mendalami peningkatan pendapatan nelayan dan hal ini biasanya disebutkan sebagai basis holistik atau menyeluruh terhadap pendalaman peningkatan pendapatan nelayan itu sendiri.

Untuk dapat mendalami peningkatan pendapatan nelayan juga tidak kalah pentingnya untuk mengingati basis keberlanjutan, pendapatan nelayan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu atau tidak dideterminasi hanya oleh waktu melaut yang dapat dilakukan oleh nelayan. Hal ini mengingati bahwa melakukan pekerjaan sebagai nelayan seringkali dibatasi oleh waktu yang memungkinkan untuk dilakukan karena adanya cuaca yang tidak memungkinkan untuk melaut.

Disinilah diperlukan adanya pendapatan yang berkelanjutan bagi nelayan karena kebutuhan ekonomi nelayan dan keluarganya berlanjut terus dan tidak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Sedangkan upaya melakukan kegiatan nelayan agar memperoleh pendapatan seringkali ditentukan oleh cuaca dalam arti tidaklah sepanjang tahun kegiatan melaut dapat dilakukan oleh nelayan apalagi dengan sarana dan armada penangkapan yang minimal untuk mengharungi lautan.

Keterbatasan sarana dan armada penangkapan yang digunakan oleh nelayan Kabupaten Belitung terlihat dari dominasi penggunaan kapal motor bertenaga kurang dari 5 GT dengan kemampuan jarak tempuh sekitar 4 mil dari bibir pantai. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan yang dimiliki nelayan untuk melaut dalam jarak yang cukup jauh dari bibir pantai serta untuk menghadapi musim laut yang tidak sepanjang tahun bersahabat dengan pekerjaan para nelayan.

Karena itu peningkatan pendapatan nelayan harus pula dikaji dari basis keberlanjutan terutama keberlanjutan berusaha para nelayan serta keberlanjutan berpendapatan sepanjang tahun. Para nelayan tetap membutuhkan pendapatan tidak hanya pada musim yang bersahabat untuk melaut tetapi juga pada saat laut tidak bersahabat. Melakukan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan disaat laut tidak mungkin untuk dilayari oleh nelayan merupakan satu diantara banyak cara yang harusnya diperhatikan untuk adanya pendapatan nelayan yang berkelanjutan sepanjang tahun.

Pendapatan nelayan yang berkelanjutan sepanjang tahun demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya merupakan salah satu langkah kearah peningkatan pendapatan nelayan secara totalitas. Dalam acuan yang lebih besar lagi maka basis berkelanjutan ini tentulah akan bermuara sebagai pembangunan perikanan yang berkelanjutan dalam arti perikanan yang menjadi sumber pendapatan bagi nelayan secara berkelanjutan sepanjang hidupnya sebagai nelayan.

Pembangunan perikanan yang berkelanjutan sesuai dengan karakteristik kehidupan sosial ekonomi perikanan yang dilakoni oleh para nelayan pada dasarnya membutuhkan adanya keberlanjutan ekologis, keberlanjutan sosial ekonomi, keberlanjutan komunitas serta keberlanjutan institusional nelayan. Keberlanjutan ekologis pastilah sangat dibutuhkan oleh nelayan untuk tetap dapat melaksanakan pekerjaan dan profesinya sehingga para nelayan juga harus mengedepankan bahwa aktivitas melaut yang dilakukannya tetap memperhatikan

adanya jaminan ketersediaan sumberdaya perairan untuk dimanfaatkan oleh para nelayan.

Penggunaan alat tangkap yang tidak memperhatikan keberlanjutan ekologis sumberdaya perikanan suatu ketika pastilah berakibat terhadap pendapatan nelayan itu sendiri. Karena itulah pembangunan perikanan yang berkelanjutan tetap harus mengedepankan bahwa alat tangkap nelayan menjamin keberlanjutan ekologis sumberdaya perairan tersebut. Hal ini tampaknya telah dilakukan oleh nelayan Kabupaten Belitung dimana alat tangkap yang banyak digunakan adalah pancing, jaring/pukat atau perangkap.

Upaya kearah peningkatan pendapatan nelayan juga ditentukan oleh adanya keberlanjutan sosial ekonomi para nelayan, sebagai bagian integral dari pembangunan perikanan berkelanjutan. Kehidupan sosial ekonomi nelayan haruslah dijadikan titik angkat untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan nelayan itu sendiri. Hal ini terutama bersangkutan dengan bagaimana para nelayan mempergunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, sehingga pendapatan nelayan yang meningkat juga mengangkat tarah kehidupan sosial ekonomi keluarga nelayan itu sendiri.

Tidak kalah pentingnya dalam upaya kearah peningkatan pendapatan nelayan adalah keberlanjutan komunitas nelayan itu sendiri. Nelayan pastilah mereka yang hidup dalam komunitasnya tersendiri sebagai komunitas dengan tradisi, etika dan budaya tertentu. Tradisi, etika dan budaya yang telah hidup pada komunitas nelayan boleh jadi merupakan penghalang untuk adanya upaya kearah peningkatan pendapatan nelayan minimal secara tidak langsung.

Berbagai kebiasaan seperti hanya mengandalkan pendapatan dari usaha melaut semata dan sering tidak memiliki pendapatan lainnya menjadi penghambat peningkatan kehidupan sosial ekonomi nelayan dan keluarganya. Karenanya dibutuhkan dukungan dari komunitas nelayan itu sendiri sehingga semua nelayan yang menjadi anggota komunitasnya dapat menggeser tradisi, kebiasaan dan budaya yang mengganjal upaya peningkatan pendapatan nelayan dapat diminimalisir.

Disamping itu nelayan pastilah menjalani kehidupan sosial ekonominya pada institusi atau kelembagaan yang mengikatnya sebagai anggota masyarakat. Berbagai kelembagaan baik kelembagaan formal ataupun kelembagaan informal telah berjalanan dengan kehidupan sosial ekonomi nelayan yang mengandalkan pendapatan dari usaha melaut terutama dengan mengumpulkan hasil dari sumberdaya perairan disekitar tempat tinggalnya.

Ikatan dengan kelembagaan formal terlihat dari adanya berbagai retribusi yang selama ini dibebankan kepada nelayan, yang akhirnya ditiadakan oleh pihak pemerintah demi peningkatan pendapatan nelayan itu sendiri. Berbeda dengan itu, maka ikatan kelembagaan yang informal tampaknya merupakan sesuatu yang sukar untuk dilepaskan dari para nelayan karena kebutuhan dan kondisi kehidupan sosial ekonominya.

Ikatan pemasaran hasil tangkapan nelayan dengan para pemasarnya merupakan ikatan informal yang cukup sukar untuk diretas sendiri oleh nelayan. Penadah atau pengecer sebagai mata rantai pemasaran hasil tangkapan nelayan merupakan kelembagaan informal yang harus diarahkan agar kelembagaan itu

menjadi kelembagaan yang menguntungkan nelayan atau meningkatkan pendapatan nelayan itu sendiri.

Disamping pembangunan perikanan yang berkelanjutan sebagai kebutuhan nelayan kearah peningkatan pendapatan nelayan juga perlu diperhitungkan adanya sumberdaya yang senyatanya dibutuhkan demi peningkatan pendapatan nelayan. Sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghadirkan pembangunan perikanan yang berkelanjutan adalah sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan serta sumberdaya sosial.

Nelayan sebagai sumberdaya manusia haruslah tetap mereka yang memiliki kemampuan dan keterampilan fisik dan psikis yang prima untuk tetap dapat melanjutkan pekerjaannya sebagai nelayan sepanjang tahun. Lebih dari itu nelayan sebagai sumberdaya manusia harusnya juga dipersiapkan untuk dapat melakukan pekerjaan lain dan berpendapatan pula selain dari bisnis inti (*core business*) melaut bilamana cuaca tidak memungkinkan mereka untuk melaut.

Nelayan adalah pekerjaan, mata pencaharian dan profesi yang membutuhkan sumberdaya alam berbentuk sumberdaya perikanan yang mencukupi. Bahkan nelayan merupakan pekerjaan yang sepenuhnya tergantung dengan anugerah alam berupa sumberdaya perikanan yang sebagian besarnya diluar kontrol manusianya.

Kontrol yang harus dilakukan nelayan terhadap sumberdaya perikanan yang menjadi lahan pendapatannya adalah agar sumberdaya perikanan itu tetap menyediakan objek tangkapan nelayan sebagai sumber pendapatannya. Melakukan penangkapan sumberdaya perikanan yang tidak memperhatikan

keberlangsungan hidup sumberdaya perikanan itu sendiri berarti mencederai sumber pendapatan nelayan.

Untuk dapat melakukan penangkapan sumberdaya perikanan maka nelayan juga membutuhkan sumberdaya buatan seperti peralatan tangkap dan armada penangkapan. Menggunakan peralatan tangkap dan armada penangkapan yang tidak mengganggu keberlangsungan ketersediaan sumberdaya perikanan merupakan kebutuhan nelayan demi adanya pendapatan nelayan sepanjang tahun terutama pada musim melaut.

Sumberdaya yang juga harus didalami untuk upaya kearah peningkatan pendapatan nelayan adalah sumberdaya sosial dari nelayan itu sendiri. Nelayan pastilah individu yang hidup dalam masyarakatnya sendiri dan untuk itu semua anggota masyarakat termasuk nelayan juga harus dapat memanfaatkan sebaik-baiknya sumberdaya sosial yang dimiliki masyarakatnya.

Sumberdaya sosial dalam suatu masyarakat sering disebutkan sebagai modal sosial suatu masyarakat. Modal sosial itu sendiri adalah norma dan nilai yang telah terbentuk dalam suatu masyarakat yang disetujui oleh semua anggota masyarakat itu sendiri. Modal sosial suatu masyarakat lazimnya terdiri dari kebersamaan, saling percaya, kepemimpinan sosial serta kearifan lokal yang dilaksanakan oleh suatu masyarakat tertentu.

Berbagai unsur modal sosial itulah yang pada gilirannya harus pula dapat didayagunakan oleh nelayan sebagai anggota masyarakatnya termasuk untuk dapat memberikan jalan kearah peningkatan pendapatan nelayan. Modal sosial

yang dilaksanakan dengan baik oleh suatu masyarakat nelayan kondusif untuk memungkinkan nelayan memperoleh pendapatan yang meningkat.

Dengan memperhatikan pendalaman yang telah dilakukan kearah upaya peningkatan pendapatan nelayan termasuk sumberdaya yang harus dipersiapkan untuk itu, maka upaya peningkatan pendapatan nelayan dapat dilakukan melalui pengurangan kerentanan, pengontrolan elastisitas dan pemanfaatan lingkungan dari kehidupan sosial ekonomi nelayan itu sendiri.

2. Peningkatan Pendapatan Nelayan melalui Pengurangan Kerentanan

Bahwa nelayan dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya menghadapi aneka kerentanan, cukup mudah untuk dideteksi terutama dengan melalui berbagai sumberdaya yang senyatanya digunakan nelayan dalam kesehariannya. Berbagai kerentanan itu pada gilirannya memunculkan penyebab belum optimalnya pendapatan nelayan, sehingga pengurangan kerentanan itu merupakan upaya yang tepat untuk meningkatkan pendapatan nelayan itu sendiri.

Kerentanan nelayan selaku sumberdaya manusia terutama untuk dapat memperoleh pendapatan sepanjang tahun tidak hanya dari melaut, mengharuskan nelayan untuk mempersiapkan diri melaksanakan berbagai hal agar tetap dapat memperoleh pendapatan sepanjang tahun. Berhadapan dengan kerentanan nelayan selaku sumberdaya manusia maka upaya yang harus dilakukan untuk itu adalah :

- (1) mempersiapkan nelayan untuk melaksanakan perikanan budidaya terutama melalui perikanan tambak dan penanaman rumput laut yang juga menjanjikan pendapatan yang lumayan bagi para nelayan itu sendiri.
- (2) melakukan pelatihan peningkatan keterampilan nelayan untuk mampu melakukan perikanan budidaya.

serta (3) mensosialisasikan kepada para nelayan agar dapat memanfaatkan waktu pada saat tidak melaut dengan keterampilan pengolahan sumberdaya perikanan sehingga bernilai jual lebih tinggi.

Kerentanan sumberdaya alam juga dihadapi oleh nelayan untuk tetap dapat melakukan pekerjaannya sebagai nelayan. Jarak tempuh yang dapat dilalui oleh nelayan untuk melakukan penangkapan sepenuhnya tergantung dari jenis perahu dan jenis alat tangkap yang digunakan nelayan. Padahal untuk dapat melakukan penangkapan yang memberikan hasil yang optimal dibutuhkan jenis perahu dan alat tangkap yang lebih canggih agar memiliki kemampuan lebih untuk lebih jauh dari bibir pantai.

Untuk menghadapi kerentanan sumberdaya alam berbentuk sumberdaya perikanan dengan jarak yang lebih jauh dari bibir pantai, maka upaya peningkatan pendapatan nelayan selayaknya dilakukan melalui: (1) modernisasi jenis perahu dan alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan sehingga memungkinkan adanya hasil tangkapan yang lebih banyak. (2) penyediaan modal kerja yang mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan melaut dengan menggunakan jenis perahu dan alat tangkap yang telah dimodernisasikan serta (3) memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir untuk dimanfaatkan sebagai sarana perikanan budidaya yang dilakukan oleh nelayan sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

Dalam melaksanakan profesinya selaku nelayan, maka para nelayan juga menghadapi kerentanan sumberdaya buatan yang dibutuhkannya termasuk teknik pengolahan hasil tangkapan serta pemasaran hasil tangkapan untuk memperoleh

pendapatan. Kebiasaan untuk langsung memasarkan hasil tangkapan kepada penadah dan pengecer membuktikan bahwa kerentanan sumberdaya buatan juga dihadapi oleh para nelayan.

Karena itu maka upaya peningkatan pendapatan nelayan berhadapan dengan kerentanan sumberdaya buatan yang dihadapi nelayan akan meliputi antara lainnya: (1) melakukan peningkatan keterampilan nelayan atau keluarga nelayan untuk mampu melakukan pengolahan hasil tangkapan sehingga memperoleh nilai jual yang lebih tinggi. (2) meminimalisir kebiasaan nelayan untuk berpola hidup yang konsumtif sampai berhutang sehingga tidak terperangkap dalam siklus pemasaran hasil tangkapan yang merugikan nelayan serta (3) meningkatkan kebiasaan menabung guna pemupukan modal terutama pada saat panen hasil tangkapan yang menghasilkan pendapatan yang relatif banyak.

Kerentanan sumberdaya sosial atau belum optimalnya pemanfaatan modal sosial yang dipunyai oleh nelayan dilingkungan masyarakatnya juga merupakan penghambat yang langsung dirasakan oleh nelayan untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Hal ini tercermin dari belum optimalnya kebersamaan, saling percaya, kepemimpinan sosial serta kearifan lokal dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan nelayan ditengah masyarakatnya.

Kebersamaan, saling percaya, kepemimpinan sosial merupakan potensi dasar dari komunitas nelayan untuk menggalang kekuatan modalnya untuk menjalankan aktivitas sebagai nelayan. Sedangkan kearifan lokal akan merupakan potensi yang seharusnya dimanfaatkan oleh nelayan untuk menentukan waktu

penangkapan yang baik serta untuk menemukan sumberdaya perikanan yang dijadikan lahan penangkapan.

Berhadapan dengan kerentanan sumberdaya sosial atau belum optimalnya pemanfaatan modal sosial komunitas nelayan maka upaya peningkatan pendapatan nelayan yang dapat dilakukan untuk itu antara lainnya adalah (1) membentuk lembaga pemupukan modal yang dilaksanakan sendiri oleh komunitas nelayan (2) menghindari interaksi sosial ekonomi nelayan dari interaksi nelayan dengan lembaga informal yang cenderung eksploitatif terhadap nelayan itu sendiri serta (3) mendayagunakan kepemimpinan sosial yang ada dalam komunitas nelayan untuk menghindarkan nelayan dari jeratan beban hutang yang berkepanjangan.

3. Peningkatan Pendapatan Nelayan melalui Pengontrolan Elastisitas

Elastisitas sebagai pembesaran dan pengecilan sumberdaya yang menyertai kehidupan sosial ekonomi nelayan adalah sesuatu yang harus disikapi dengan baik sehingga elastisitas itu tidak berpengaruh kurang baik terhadap peningkatan pendapatan nelayan. Berbagai elastisitas itu memiliki kecenderungan tersendiri sesuai dengan keberadaan sumberdaya yang diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi nelayan.

Karena itu maka terhadap berbagai elastisitas sumberdaya yang senyatanya hadir dalam kehidupan sosial ekonomi nelayan haruslah dapat dikontrol dengan baik agar elastisitas itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Ketidakmampuan untuk mengontrol elastisitas sumberdaya itu berarti

membiarkan elastisitas sumberdaya itu tanpa memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan nelayan.

Nelayan sebagai lapangan kerja bukanlah lapangan kerja yang hanya berpretensi tunggal yaitu melaut ke laut lepas untuk menangkap ikan dan sumberdaya perikanan dan kelautan lainnya. Nelayan mempunyai kesempatan untuk mempergunakan tenaganya pada lapangan kerja nelayan dalam artian yang lebih luas, sehingga pada saatnya nelayan yang dapat melakukan lebih dari sekedar melaut ke laut lepas tentulah nelayan yang dapat melakukan peningkatan pendapatannya.

Berhadapan dengan elastisitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh nelayan maka upaya peningkatan pendapatan nelayan yang dapat dilakukan antara lainnya adalah (1) melakukan pekerjaan samping terutama pada waktu tidak mungkin untuk melaut dengan pekerjaan yang produktif seperti melakukan usaha pertanian karena adanya ketersediaan lahan disekitar perkampungan nelayan yang dapat digarapnya (2) melakukan pemberdayaan keluarga nelayan agar turut serta memperoleh pendapatan melalui berbagai usaha ekonomi produktif yang dapat dilakukannya serta (3) memberikan proteksi atau perlindungan terhadap kesehatan fisik para nelayan agar senantiasa siap untuk melaut atau tetap memperoleh pendapatan.

Sumberdaya alam juga memiliki elastisitas tersendiri untuk didayagunakan oleh nelayan dalam meningkatkan pendapatannya. Laut telah tersedia dalam jangkauan yang luas untuk dijadikan lahan penangkapan oleh nelayan tetapi nelayanlah yang memiliki keterbatasan untuk mendayagunakan laut sebagai lahan

untuk memperoleh pendapatan terutama karena keterbatasan armada penangkapan dan alat tangkap yang digunakannya.

Tetapi keterbatasan armada penangkapan dan alat tangkap yang digunakan nelayan untuk menangkap sumberdaya laut pada jarak yang jauh dari bibir pantai, haruslah tidak didalihkan untuk menggunakannya secara semena-mena pada laut yang dekat dengan pesisir pantai. Tetap diperlukan adanya pembatasan tentang sumber biota laut yang dapat ditangkap atau dimanfaatkan oleh nelayan, sehingga tidak terjadi kerusakan daur hidup dari biota dan sumberdaya laut tersebut.

Berarti elastisitas sumberdaya alam laut yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan juga harus merupakan elastisitas yang dibatasi demi keberlangsungan daur hidup sumberdaya laut tersebut. Menangkap ikan atau biota laut yang potensial untuk berkembang lebih lanjut secara membabi buta akan merusak daur hidup biota laut tersebut.

Berhadapan dengan elastisitas sumberdaya alam yang dapat digunakan oleh nelayan sebagai sumber pendapatannya maka upaya peningkatan pendapatan nelayan yang dapat dilakukan antara lainnya adalah (1) menjaga daur hidup sumberdaya laut dan biota laut agar tetap terjamin keberlangsungan ketersediaannya untuk dimanfaatkan nelayan pada masa-masa mendatang (2) memelihara lingkungan fisik laut dari pencemaran laut sehingga mengganggu pertumbuhan sumberdaya dan biota laut serta (3) menjaga ekosistem pesisir agar tetap menjadi ekosistem yang memungkinkan untuk perkembangan sumberdaya dan biota laut untuk dimanfaatkan oleh nelayan.

Elastisitas sumberdaya buatan pada kehidupan nelayan terutama bersangkutan dengan alat tangkap dan armada penangkapan yang digunakan serta teknologi pengolahan hasil tangkapan yang dilakukan oleh nelayan sebelum hasil tangkapan dipasarkan. Armada penangkapan dan alat tangkap merupakan sarana dengan elastisitas tinggi yang seharusnya dimanfaatkan oleh nelayan demi memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak.

Teknologi pengolahan hasil tangkapan juga mempunyai elastisitas yang tinggi untuk didayagunakan oleh nelayan demi meningkatkan harga jual hasil tangkapannya. Tetapi berdasarkan deskripsi yang terlihat sebelumnya belum ada teknologi pengolahan hasil tangkapan yang dilakukan oleh nelayan maupun keluarganya demi memingkatkan nilai jual hasil tangkapannya karena semua hasil tangkapan langsung dipasarkan dalam keadaan asli atau apa adanya.

Armada penangkapan dan alat tangkap yang digunakan yang mempunyai daya jangkau yang lebih jauh kondusif untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Tetapi pemanfaatan armada dan alat tangkap yang lebih modern tentu saja membutuhkan modal awal yang cukup banyak dibandingkan dengan apa yang telah digunakan nelayan pada saat ini.

Untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak para nelayan membutuhkan informasi tentang cuaca dan lokasi potensial sumberdaya perikanan, dan yang telah digunakan cenderung sebagai kebiasaan dari para leluhurnya. Padahal selayaknya nelayan telah mendapatkan informasi yang lengkap tentang cuaca dan potensi sumberdaya perikanan, apalagi dengan

berkembangnya teknologi informasi yang selayaknya juga dimanfaatkan untuk kesuksesan pekerjaan nelayan melaut.

Berhadapan dengan elastisitas sumberdaya buatan yang dimiliki oleh nelayan maka upaya peningkatan pendapatan nelayan yang dapat dilakukan antara lainnya adalah (1) menerapkan teknologi pengolahan hasil perikanan yang dapat dilakukan oleh keluarga nelayan agar nilai jual hasil perikanan semakin tinggi (2) penyediaan informasi tentang cuaca dan sumberdaya perikanan yang potensial untuk dimanfaatkan oleh nelayan oleh lembaga yang berkompeten serta (3) penyediaan bahan bakar armada penangkapan nelayan yang terjamin ketersediaannya oleh lembaga yang berkompeten.

Sumberdaya sosial yang dimiliki oleh nelayan dalam masyarakatnya juga merupakan sumberdaya dengan elastisitas yang tinggi untuk dimanfaatkan demi peningkatan pendapatan nelayan. Sumberdaya sosial yang merupakan modal sosial dari masyarakat nelayan adalah penopang kehidupan sosial ekonomi nelayan untuk menghadapi berbagai hal yang dihadapi oleh nelayan selaku anggota dari masyarakatnya.

Ikatan yang dibentuk oleh modal sosial masyarakat termasuk pada masyarakat nelayan merupakan faktor yang dapat digunakan untuk meretas jalan kearah upaya peningkatan pendapatan yang menjurus kearah kesejahteraan nelayan. Ikatan modal sosial itu telah terbentuk terutama melalui adanya lembaga-lembaga masyarakat nelayan yang telah dimiliki semenjak lama oleh masyarakat nelayan itu sendiri. Berbagai komponen modal sosial seperti kebersamaan, saling percaya, kepemimpinan sosial serta kearifan lokal merupakan komponen yang

harus didayagunakan setiap kali nelayan dijadikan objek peningkatan pendapatannya.

Karena itu maka berhadapan dengan elastisitas sumberdaya sosial atau modal sosial yang dimiliki oleh nelayan maka upaya peningkatan pendapatan nelayan yang dapat dilakukan antara lainnya adalah (1) mendayagunakan lembaga masyarakat nelayan sebagai struktur untuk memberikan insentif kepada para nelayan (2) memberikan insentif kepada nelayan dengan sekaligus menyuburkan rasa kebersamaan, saling percaya, kepemimpinan sosial dan kearifan lokal masyarakat nelayan serta (3) mengupayakan lembaga masyarakat yang telah ada sebagai mitra lembaga keuangan mikro dan koperasi untuk berinteraksi dengan nelayan.

4. Peningkatan Pendapatan Nelayan melalui Pemanfaatan Lingkungan

Kehidupan sosial ekonomi nelayan merupakan kehidupan yang tidak terpisahkan dari kebutuhan akan adanya lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Lingkungan fisik nelayan adalah daerah pesisir dan kelautan sedangkan lingkungan sosial dari nelayan adalah masyarakat ditempat mana nelayan itu bertempat tinggal bersama keluarganya.

Lingkungan fisik yang menjadi lahan bagi terlaksananya kehidupan sosial ekonomi para nelayan terutama wilayah pesisir dan kelautan serta lahan pertanian disekitar tempat tinggalnya merupakan lingkungan yang dapat memberi manfaat terhadap nelayan. Bila sumberdaya pesisir dan kelautan menjadi fokus utama bagi nelayan selama melaksanakan profesinya sebagai nelayan, maka lahan disekitar

tempat tinggalnya haruslah pula dijadikan focus untuk adanya peningkatan pendapatan nelayan beserta keluarganya.

Berhadapan dengan adanya lingkungan fisik yang senyatanya dapat diolah oleh nelayan maka pemanfaatan lingkungan untuk meningkatkan pendapatan nelayan antara lain adalah melalui (1) melaksanakan budi daya perikanan dan kelautan percontohan disekitar tempat tinggal nelayan untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh nelayan secara individual atau berkelompok (2) melaksanakan percontohan usaha pertanian yang dapat dilakukan nelayan dan keluarganya sesuai dengan karakteristik wilayah yang bersangkutan serta (3) melibatkan masyarakat nelayan untuk aktif dalam sektor perkebunan yang juga dapat memberikan pendapatan terhadap keluarga nelayan.

Disamping pemanfaatan lingkungan fisik atau lingkungan alamiah, nelayan pastilah pula memiliki lingkungan sosial yang selayaknya dapat dimanfaatkan pula oleh nelayan demi peningkatan pendapatannya. Lingkungan sosial bagi masyarakat nelayan pastilah pula memiliki modal sosial tersendiri yang antara lain mempunyai norma dan nilai kebersamaan, saling percaya, kepemimpinan sosial serta kearifan lokal masyarakat nelayan setempat.

Memperhatikan lingkungan sosial yang terkerangka sekitar kehidupan sosial ekonomi nelayan, maka upaya peningkatan pendapatan nelayan melalui pemanfaatan lingkungan sosialnya antara lainnya adalah (1) melakukan pemberian insentif atau bantuan terhadap nelayan dengan tetap menggunakan lembaga masyarakat nelayan itu sendiri (2) memberikan fasilitas permodalan dengan memperhatikan struktur sosial dari lembaga masyarakat nelayan serta (3)

mensosialisasikan norma sistem bagi hasil dalam usaha penangkapan ikan yang cenderung lebih adil bagi semua pihak melalui lembaga masyarakat nelayan setempat.

Upaya peningkatan pendapatan nelayan melalui pengurangan kerentanan, pengontrolan elastisitas serta pemanfaatan lingkungan seperti diulas terdahulu merupakan suatu objek yang akan ditingkatkan. Karena itu dipastikan bahwa yang akan ditingkatkan adalah pendapatan nelayan untuk pada saatnya bermuara sebagai kesejahteraan nelayan dan keluarganya sekurangnya kesejahteraan sosial ekonominya.

Peningkatan pendapatan nelayan sebagai suatu objek capaian hasil (kinerja) tentulah mengharuskan adanya subjek yang akan melakukan proses untuk mencapai kinerja tersebut. Walau disebutkan sebagai peningkatan pendapatan nelayan, maka pihak yang seharusnya berperan sebagai subjek peningkatan kinerja pendapatan nelayan adalah semua pihak yang bersangkutan dengan kehidupan nelayan pada umumnya.

Dengan memperhatikan realita kehidupan sosial ekonomi nelayan maka dapat diidentifikasi bahwa subjek peningkatan kinerja pendapatan nelayan terdiri dari nelayan individual, lembaga masyarakat nelayan, lembaga swasta serta lembaga pemerintah. Individu nelayan sebagai subjek kinerja peningkatan pendapatan nelayan tentulah mengharuskan mereka untuk tetap bersikap optimis serta berkemauan kuat untuk senantiasa melakukan upaya peningkatan pendapatannya.

Lembaga masyarakat nelayan adalah subjek yang seharusnya berperan penting pula dalam pencapaian kinerja peningkatan pendapatan nelayan. Berbagai upaya yang dilakukan nelayan secara individual tentulah akan semakin menguatkan tekad nelayan itu sendiri bilamana upaya itu mendapatkan dukungan pula dari lembaga masyarakat nelayan itu sendiri.

Lebih dari sekedar mendukung upaya peningkatan pendapatan nelayan yang dilakukan oleh nelayan secara individual, cukup banyak upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat nelayan demi berperan dalam peningkatan pendapatan nelayannya. Sesuai dengan proporsi dan karakteristik dari lembaga masyarakat nelayan, maka modal sosialnya dapat digunakan untuk mendukung dan melakukan upaya peningkatan pendapatan nelayan pada umumnya.

Kebersamaan, saling percaya, kepemimpinan sosial serta kearifan lokal sebagai unsur modal sosial diwujudkan oleh dan melalui lembaga masyarakat nelayan adalah sikap yang senantiasa harus dipupuk demi terwujudnya peningkatan pendapatan nelayan. Kehidupan sosial ekonomi nelayan yang ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan untuk sebagian besarnya memang dipicu dan dipacu oleh penerapan unsur modal sosial masyarakat nelayan itu sendiri.

Sampai batas-batas tertentu peningkatan pendapatan nelayan juga dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh lembaga swasta terutama dengan pendirian pabrik atau usaha pengolahan hasil tangkapan nelayan serta fasilitas pembiayaan dan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan. Bila tersedia usaha pengolahan hasil tangkapan nelayan dalam skala yang lebih besar tentu saja

nelayan memperoleh jaminan pemasaran hasil tangkapannya untuk tidak terperangkap secara terus menerus dengan pemasaran yang cenderung mengeksploitasi nelayan yang secara langsung melakukan penangkapan kelaut.

Fasilitas pembiayaan dan keuangan dari lembaga swasta ataupun lembaga pemerintah memungkinkan nelayan untuk mendapatkan modal usaha baik modal tetap maupun modal lancar seperti halnya bahan bakar untuk menggerakkan armada penangkapannya. Namun tetap harus dengan catatan bahwa keberadaan lembaga swasta dalam meningkatkan pendapatan nelayan tetap harus membutuhkan pengawasan langsung terutama dari lembaga pemerintah agar lembaga swasta tersebut tidak menjadi lembaga yang mengeksploitasi nelayan.

Lembaga pemerintah adalah subjek kinerja peningkatan pendapatan nelayan yang seharusnya memperhatikan kehidupan sosial ekonomi nelayan secara holistik dan menyeluruh. Berbagai program lembaga pemerintah yang diperkenalkan kepada masyarakat hendaknya menjadi program yang tidak hanya melihat nelayan sebagai individual tetapi sekaligus sebagai anggota dari lembaga masyarakat nelayan.

Berbagai upaya peningkatan pendapatan nelayan seperti telah diulas terdahulu untuk sebagiannya pastilah melibatkan lembaga pemerintah sesuai dengan keberadaannya. Apalagi di Kabupaten Belitung dengan populasi nelayan yang cukup signifikan dibandingkan jumlah penduduk yaitu sekitar 30% dari keseluruhan penduduk bergantung kehidupannya pada sektor perikanan terutama perikanan tangkap.

Tentulah tidak serta merta dengan adanya penghapusan berbagai retribusi yang selama ini dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Belitung menjadikan menyurut pula perhatian dan pelayanan terhadap nelayan. Perhatian dan pelayanan dari lembaga pemerintah terhadap rakyatnya termasuk nelayan adalah tugas utama yang tetap harus dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dalam situasi apapun juga.

Karena itu upaya peningkatan pendapatan nelayan tetap harus merupakan bagian integral utama dalam program pembangunan perikanan berkelanjutan di Kabupaten Belitung. Berbagai upaya peningkatan pendapatan seperti yang ditampilkan terdahulu dalam pelaksanaannya layak menjadi bagian utama yang dipentingkan dari berbagai program pemerintah untuk rakyatnya dengan catatan tetap melibatkan lembaga masyarakat setempat termasuk lembaga masyarakat nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan ulasan pada bagian terdahulu termasuk analisis dan pembahasan yang telah dilakukan tentang peningkatan pendapatan nelayan di Kabupaten Belitung, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan rata-rata nelayan sebelum dan sesudah penghapusan retribusi terhadap nelayan atau tidak terdapat perbedaan pada pendapatan rata-rata nelayan baik sebelum maupun sesudah penghapusan retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Belitung.

Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara penghapusan retribusi terhadap pendapatan nelayan karena tarif retribusi untuk tambat/labuh, sebagian besar nelayan hanya dibebani Rp. 1.000,- untuk sekali tambat/labuh, sehingga nelayan hanya membayar sebesar Rp. 30.000,- pada setiap bulannya. Tarif retribusi pengiriman atau pengangkutan ikan sebesar 2,5% dikalikan produktivitas dikalikan harga patokan ikan dibebankan pada juragan atau pengusaha yang mengirimkan ikan keluar daerah, pada pelaksanaannya juragan atau pengusaha membebankannya pada nelayan, akan tetapi setelah penghapusan retribusi tersebut tidak meningkatkan bagi hasil dan harga jual yang bisa dinikmati oleh nelayan. Sedangkan retribusi pelelangan hasil perikanan dibebankan pada penjual (nelayan) sebesar 3% dan pembeli (bakul) 3%, akan tetapi pelelangan tidak berjalan disebabkan oleh tempat pendaratan kapal nelayan tersebar di seluruh pesisir di Kabupaten Belitung tidak terpusat di Pelabuhan

Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang memiliki tempat pelelangan ikan, sebagian besar nelayan melakukan penangkapan hanya satu hari melaut (*one day fishing*), menurunkan mutu ikan-ikan kualitas ekspor. Penyebab lain adalah tidak meratanya penerapan retribusi yang dibebankan kepada nelayan di Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, pendapatan mereka tidak jauh berbeda antara sebelum dan sesudah penghapusan retribusi.

B. Saran

Upaya peningkatan pendapatan nelayan di Kabupaten Belitung membutuhkan keterlibatan beberapa pihak sebagai subjek peningkatan kinerja peningkatan pendapatan nelayan, yang sekaligus merupakan pihak yang harus memberikan perhatian terhadap upaya tersebut. Karena itu kepada lembaga pemerintah disemua tingkatan termasuk Pemerintah Kabupaten Belitung disarankan untuk :

Pertama, memperhatikan lebih tajam upaya peningkatan pendapatan nelayan yang senyatanya dapat dilakukan melalui pengurangan kerentanan, pengontrolan elastisitas dan pemanfaatan lingkungan kehidupan sosial ekonomi nelayan pada setiap kali memformulasi dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang berfokus terhadap nelayan.

Kedua, tetap melanjutkan kebijakan pemerintah melakukan pelayanan terhadap kehidupan sosial ekonomi nelayan agar memperoleh peningkatan pendapatan walaupun beberapa retribusi yang dikenakan terhadap nelayan telah dihapuskan.

Ketiga, memberikan insentif kepada lembaga swasta yang bermitra dengan nelayan dalam upaya peningkatan pendapatan nelayan demi kesejahteraan keluarga nelayan.

Keempat, senantiasa melibatkan lembaga masyarakat nelayan setiap kali mengimplementasikan kebijakan pemerintah dengan kelompok sasaran nelayan.

Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

- Albertson, Maurice L. (1999). *The Village Earth Model for Sustainable Village Development*. Colorado State University. Fort Collin. Colorado, USA.
- Anderson, James E. (1979). A Theoretical Foundation for the Gravity Equation, *American Economic Review*. *American Economic Association*, vol. 69(1), pp. 06-16.
- Anutha, K & Johnson, D. (1996). Aquaculture and Coastal Management in Tasmania. *Journal of Ocean and Coastal Management*, vol. 33, no. 1 – 3, pp. 167 –192.
- Arrow, K., Bolin, B., Costanza, R., Dasgupta, P., Folke, C., Holling, C.S., Jansson, B-O., Levin, S., Maler, K.-G., Perrings, C. & Pimentel, D. (1995). *Journal of Economic growth, carrying capacity, and the Environment*, vol. 268, pp. 520–521.
- Aryanto, Rudy. (2003). *Environmental Marketing Pada Ekowisata Pesisir: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Daerah Otonom*. P062024264 / S3 / PSL / IPB.
- BPS.& BAPPEDA Kabupaten Belitung.(2010). *Belitung Dalam Angka.2009*. Kabupaten Belitung : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung
- Dahuri R. (1998). *The Application of Carrying Capacity Concept for Sustainable Coastal Resources Development in Indonesia*. Center for Coastal and Marine Resources Studies (CCMRS). Bogor Agricultural University (IPB). *Jurnal PSPL Indonesia*, vol. 1, no. 1.
- Devas, Nick, dkk. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Dhofir, Syargowi. (2000). *Pengantar Metodologi Riset Dengan Spektrum Islami*. Prenduan: Iman Bela.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung.(2011).*Laporan Tahunan. 2010*. Kabupaten Belitung: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung
- Fauzi, Ahmad. & Suzy, Anna. (2002). "Penilaian Depresiasi Sumber Daya Perikanan sebagai Bahan Pertimbangan Penentuan Kebijakan Pembangunan Perikanan". *Jurnal Pesisir dan Lautan*, vol. 4(2), pp. 36-49.

- Fauzi, Ahmad. & Suzy, Anna. (2002). "Penilaian Depresiasi Sumber Daya Perikanan sebagai Bahan Pertimbangan Penentuan Kebijakan Pembangunan Perikanan". *Jurnal Pesisir dan Lautan*, vol. 4(2), pp. 36-49.
- Gorys, Keraf. (2000). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hardin G. (1985). Cultural Carrying Capacity. *Journal of Coastal Research*: Harits, Benyamin. (1995). Peranan Administrasi Pemerintah Daerah. Prisma, pp. 80-87.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan.(2009). *Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penghapusan retribusi perikanan Nomor B.636/Men-KP/XI/09 Tanggal 16 November 2009*. Jakarta:Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kusnadi. (2006). *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: LKIS.
- Kusumastanto T. (2000). Pembangunan Sektor Kelautan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir: Makalah Disampaikan dalam Pelatihan Dosen Muda pada Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Secara Berkelanjutan. *IPB Bogor dan The Papua New Guinea University of Technology*. Bogor.
- Lim LC. (1998). Carrying Capacity Assessment of Pulau Payar Marine Park, Malaysia. *Defining Carrying Capacity of the Coastal Zone*. Bay of Bengal Programme Madras. India.
- Mc Queen, Jim. (1998). Development of a Model User Fees-A Model on Policy Development in Creating and Maintaning User Fees for Municipatities: The Local Government Program Departemen of Political Science. *Paper MPA Research*. University of Western Otario.
- Munawir S. (1997). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogtakarta: Liberty.
- Nikijuluw, V.P.H. (1995). Community-based Fishery Management (sasi) in Central Maluku. *In Indonesian Agricultural Research and Development Journal*, vol. 17, no. 2.

- Radityo, P., Risna, Y. & Manadiyanto. (2010). Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Retribusi Perikanan (Studi Kasus di Daerah Subang, Jawa Barat). *Jurnal Borneo Administrator* V 7 (1).
- Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Makara Sosial Humaniora*, vol. 7, pp. 49-51.
- Said Ali, Harahap. (2003). Analisis Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Nelayan di Medan Belawan, Sumut. *Tesis S2 PPS USU*. Medan.
- Salim, Agus. (1999). Analisis Tingkat Pendapatan Nelayan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kecamatan Syiah Kuala Kotamadya Banda Aceh. *Tesis S2 PPS USU*. Medan.
- Sasmita. (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Nelayan di Kabupaten Asahan. *Tesis S2.PPS USU*. Medan.
- Smith, Adam. (1979). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, edited by R.H. Campbell and A.S. Skinner. Oxford: Oxford University Press.
- Subade, R.F. & N.M.R. Abdullah. (1993). Are Fishers Profit Maximizers The case of Gillnetters in Negros Occidental and Iloilo, Philippines. *Asian Fisheries Science*, vol. 6, pp. 39-49.
- Sujarno. (2008). Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Langkat. *Tesis S2 PPS USU*. Medan.
- Zulfikar. (2002). Analisis Sistem Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Buruh Nelayan di Kabupaten Deli Serdang, Sumut. *Sekripsi S1 EP USU*. Medan.

Peraturan Perundang-undangan

- Pemerintah Kabupaten Belitung. (2001). Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan.
- Pemerintah Kabupaten Belitung. (2001). Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelelangan Ikan.

Pemerintah Kabupaten Belitung. (2001). Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2005 tentang retribusi tempat pendaratan kapal.

Universitas Terbuka

Lampiran 1
Hasil Pengujian Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 sebelum dihapusnya retribusi – sesudah dihapusnya retribusi	-.10526	.67593	.06935	-.24296	.03243	-1.518	94	.132

Universitas Terbuka

Lampiran 2 Kuisisioner

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Program Studi Magister Manajemen Perikanan (MMP), Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta, dengan ini saya :

Nama : Firdaus Idhamsyah
NIM : 015584311
Program Studi : Magister Manajemen Perikanan (MMP)

Mengajukan tugas akhir program magister (TAPM)/ tesis dengan judul **Pengaruh Kebijakan Penghapusan Retribusi Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Belitung.**

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyusun kuisisioner yang berkaitan dengan kebijakan penghapusan retribusi perikanan di Kabupaten Belitung , untuk itu diharapkan kepada Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam kuisisioner ini dengan jawaban yang benar dan akurat agar data tersebut dapat diolah/dianalisa, sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Demikian atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu/Saudara serta kesediaan dalam meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner ini, saya ucapkan terima kasih

Hormat Saya,

Firdaus Idhamsyah

KUISIONER
PENGARUH KEBIJAKAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI PERIKANAN
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN
DI KABUPATEN BELITUNG

Kecamatan :

Desa :

1. NAMA :
2. Umur :
3. Alamat :
4. Tingkat Pendidikan :
5. Berdasarkan pendapatan Saudara bekerja sebagai nelayan ?
a. Penuh b. Sambilan utama c. Sambilan tambahan
6. Apakah status Saudara bekerja sebagai nelayan ?
a. Buruh b. Jurangan/pemilik
7. Jika sebagai nelayan buruh, bagaimana sistem upah yang diberikan kepada Saudara ?
a. Upah tetap b. Bagi hasil c. Lainnya
.....
8. Jika bagi hasil, berapa besarnya bagi hasil yang diberikan kepada Saudara ?
(setelah dikurangi biaya operasional)
a. <10% b. 10 – 20% c. 20 – 30% d. ≥ 30%
9. Berapakah pendapatan rata-rata saudara perbulan berdasarkan hasil penangkapan ikan sebelum dihapusnya retribusi ?
a. <500 000 b. 501 000 – 1 000 000
c. 1 000 001 – 2 000 000 d. ≥ 2 000 000
10. Ada tiga jenis retribusi yang dipungut kepada nelayan di Kabupaten Belitung yaitu 1). Retribusi Pelelangan, 2). Retribusi Pengiriman Ikan, dan 3) Retribusi tambat labuh. Apakah Saudara tahu tentang retribusi tersebut ? .
a. Tahu b. Tidak tahu
11. Pernahkah Saudara dipungut/membayar retribusi tersebut ?
a. Pernah b. Tidak pernah

12. Apakah menurut Saudara kebijakan penghapusan retribusi terhadap nelayan di Kabupaten Belitung sudah tepat.
 a. Tepat b. Tidak tepat c. Lainnya.....
13. Bagaimana menurut Saudara apakah kebijakan penghapusan retribusi terhadap nelayan di Kabupaten Belitung berpengaruh pada peningkatan pendapatan nelayan ?
 a. Berpengaruh b. Tidak berpengaruh c. Sama saja
14. Bagaimana pendapatan Saudara sekarang bila dibandingkan sebelum dihapusnya retribusi perikanan di Kabupaten Belitung ?
 a. Lebih besar b. Lebih kecil c. Sama saja
15. Berapa biaya (modal kerja) rata-rata yang diperlukan untuk pergi sekali melaut/per trip ?
 a. <500 000 b. 501 000 – 1 000 000
 c. 1 001 000 – 2 000 000 d. ≥ 2 000 000
16. Berkaitan dengan Tata niaga/penjualan, kemana saudara menjual hasil tangkapan ikan ?
 a. Konsumen/RT b. Penadah/pengecer c. Pengolah ikan d. Pedagang besar/eksportir.
17. Apa saja jenis dan komposisi ikan hasil tangkapan per trip

No.	Jenis Tangkapan	Volume (Kg)	Harga per Kg (Rp)	Nilai (Rp)
1.	Ikan			
2.	Ikan			
3.	Ikan			
4.	Ikan			
5.			
6.			
7.			
8.	Jumlah			

18. Berapakah pendapatan rata-rata saudara perbulan berdasarkan hasil penangkapan ikan setelah dihapusnya retribusi?
 a. <500 000 b. 501 000 – 1 000 000 c. 1 001 000 – 2 000 000 d. ≥ 2 000 000

19. Bagaimana sistem pembagian hasil tangkapan/penjualan :

.....

20. Bagaimana sistem penjualan hasil tangkapan :

.....
.....
.....

21. Bagaimana perkiraan musim penangkapan yang Saudara lakukan (Musim-musim yang baik untuk melakukan penangkapan) :

.....
.....
.....

22. Jenis perahu/kapal motor apa yang saudara gunakan untuk melaut ?

- a. Perahu tanpa motor b. Motor tempel c. KM <5 GT d. KM > 5 GT

23. Jenis alat tangkap apa yang Saudara gunakan untuk menangkap ikan di laut ?

- a. Pancing b. Jaring/pukat c. Perangkap d. Lainnya

24. Bagaimana keragaan/spesifikasi alat tangkap yang Saudara gunakan (dimensi alat tangkap dan gambar desainnya) :

- Jumlahnya
- Panjang.....
- Lebar
- Tinggi.....
-
-

Gambar :

25. Jika Saudara melaut, berapa jauh jarak yang Saudara tempuh ke daerah sasaran Tangkapan (fishing ground) ?

- a. ≤ 2 Mil b. 2 - 4 Mil c. > 4 Mil d. Lainnya

Lampiran 3 Data Hasil Penelitian

Obs	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	Loasi Sampel
1	1	2	-	-	> 2,000,000	1	2	1	1	3	< 500,000	1	-	> 2,000,000	-	-	-	1	1,2,3	2	
2	1	2	2	3	501,000-1,000,000	2	2	3	3	3	501,000-1,000,000	4	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	3	1	
3	1	2	-	-	1,100,000-2,000,000	2	2	3	2	3	< 500,000	1,2	-	1,100,000-2,000,000	-	-	-	3	1,2,3	1	
4	2	2	2	-	1,100,000-2,000,000	2	2	3	3	3	501,000-1,000,000	2	-	1,100,000-2,000,000	-	-	-	3	1,3	1	
5	1	2	2	-	501,000-1,000,000	2	2	3	3	3	< 500,000	2	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	1	1	
6	1	2	2	-	1,100,000-2,000,000	2	2	1	3	3	< 500,000	2	-	1,100,000-2,000,000	-	-	-	4	1,2	2	
7	1	2	2	-	501,000-1,000,000	2	2	1	3	3	< 500,000	1,2	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	1,2,3	1	
8	1	2	2	-	501,000-1,000,000	2	2	1	3	3	< 500,000	1,2	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	1,3	2	
9	1	1	2	3	1,100,000-2,000,000	1	1	2	2	2	6,000,000	1	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	1,3	1	
10	1	1	2	2	1,100,000-2,000,000	1	1	2	1	2	< 500,000	3	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	1,3	2	
11	1	2	2	2	501,000-1,000,000	1	1	2	1	2	1,100,000-2,000,000	1	-	1,100,000-2,000,000	-	-	-	3	1,2	4	
12	1	1	2	2	1,100,000-2,000,000	1	1	2	1	2	> 2,000,000	1	-	501,000-1,000,000	-	-	-	4	1,3	4	
13	1	2	2	-	200,000-300,000	1	2	3	3	3	100,000	1	-	200,000-300,000	-	-	-	3	1	4	
14	1	2	2	2	501,000-1,000,000	1	1	2	1	2	1,500,000	2	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	1	4	
15	1	1	2	-	< 500,000	1	1	2	1	2	1,500,000	2	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	1	4	
16	1	2	2	2	1,100,000-2,000,000	1	1	1	2	3	> 2,000,000	1	-	1,000,000-2,000,000	-	-	-	3	1,3	4	
17	1	1	3	2	501,000-1,000,000	0	2	3	3	3	> 2,000,000	1	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	1,3	4	
18	1	2	2	3	1,100,000-2,000,000	1	1	2	1	2	6,000,000	4	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	1,3	4	
19	1	2	2	-	3,500,000-4,000,000	1	2	3	3	3	800,000	4	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	3	4	
20	1	1	3	-	< 500,000	1	2	3	3	3	100,000	1	-	200,000-300,000	-	-	-	3	3	4	
21	1	2	2	2	501,000-1,000,000	1	1	2	2	3	1,100,000-2,000,000	1	-	1,100,000-2,000,000	-	-	-	3	1	4	
22	3	1	3	2	501,000-1,000,000	2	2	2	2	2	501,000-1,000,000	1	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	1	3	
23	1	2	3	-	501,000-1,000,000	2	2	2	2	3	< 500,000	1	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	1	3	
24	1	2	2	2	501,000-1,000,000	2	2	2	1	1	501,000-1,000,000	2	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	2	3	
25	1	1	2	-	600,000	1	2	3	3	3	501,000-1,000,000	2	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	2	3	
26	1	1	2	1	< 500,000	2	1	1	3	3	< 500,000	3	-	501,000-1,000,000	-	-	-	2	1	1	
27	2	2	2	3	501,000-1,000,000	2	1	2	3	3	> 2,000,000	3	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	2,3	3	
28	1	2	1	4	> 2,000,000	1	1	2	1	2	< 500,000	4	-	< 500,000	-	-	-	2	1	2	
29	1	1	2	1	< 500,000	2	1	1	1	3	< 500,000	4	-	< 500,000	-	-	-	3	1	1	
30	2	2	2	2	< 500,000	1	1	1	1	3	< 500,000	4	-	< 500,000	-	-	-	2	1	2	
31	1	2	2	-	501,000-1,000,000	1	1	1	2	3	< 500,000	2	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	2	1	
32	1	2	2	3	501,000-1,000,000	1	1	1	3	3	1,100,000-2,000,000	1	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	2	2	
33	1	2	2	4	501,000-1,000,000	1	1	1	3	3	< 500,000	2	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	1	2	
34	1	2	2	-	501,000-1,000,000	2	1	1	2	2	< 500,000	2	-	501,000-1,000,000	-	-	-	2	1	1	
35	1	2	2	1	< 500,000	2	1	2	2	2	> 2,000,000	4	-	< 500,000	-	-	-	3	1	1	
36	1	1	1	3	< 500,000	1	1	1	-	3	-	2	-	< 500,000	-	-	-	3	1	2	
37	1	1	2	4	< 500,000	2	1	1	1	3	501,000-1,000,000	2	-	501,000-1,000,000	-	-	-	1	1	1	
38	1	2	2	4	501,000-1,000,000	2	1	1	3	3	< 500,000	2	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	1	1	
39	1	2	2	2	501,000-1,000,000	2	1	1	3	3	501,000-1,000,000	3	-	501,000-1,000,000	-	-	-	1	1	3	
40	1	2	2	-	1,100,000-2,000,000	2	2	2	3	3	501,000-1,000,000	2	-	501,000-1,000,000	-	-	-	3	1	1	
41	1	1	2	2	< 500,000	1	1	2	1	2	< 500,000	4	-	501,000-1,000,000	-	-	-	2	1,2	1	
42	1	2	2	1	< 500,000	2	1	1	2	2	> 2,000,000	3	-	< 500,000	-	-	-	4	2	2	
43	1	2	2	-	-	2	2	-	-	-	< 500,000	3	-	1,100,000-2,000,000	-	-	-	4	1	-	
44	1	2	2	3	501,000-1,000,000	1	1	2	3	3	1,100,000-2,000,000	3	-	< 500,000	-	-	-	3	3	2	
45	1	2	2	-	< 500,000	1	1	1	3	3	< 500,000	2	-	< 500,000	-	-	-	3	1,3	1	
46	1	2	2	4	1,100,000-2,000,000	2	2	1	2	3	< 500,000	3	-	1,100,000-2,000,000	-	-	-	4	4	4	
47	1	2	2	-	< 500,000	1	1	1	3	3	-	4	-	-	-	-	-	4	1	1	
48	1	2	2	2	501,000-1,000,000	2	1	2	3	3	< 500,000	3	-	1,100,000-2,000,000	-	-	-	1	1	2	

		SIJUK										MEMBALONG										
49	1	2	2	-	501,000-1,000,000	1	1	1	1	1	-	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
50	1	2	2	-	501,000-1,000,000	1	1	1	1	1	1	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-
51	1	2	2	-	1,100,000-2,000,000	2	2	1	3	3	3	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-
52	1	2	2	-	501,000-1,000,000	1	1	1	2	1	3	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
53	1	2	2	-	1,100,000-2,000,000	1	2	1	3	3	3	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
54	1	2	2	-	1,100,000-2,000,000	1	1	1	3	3	3	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
55	1	2	2	-	501,000-1,000,000	1	2	1	3	3	3	501,000-1,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
56	1	2	2	-	501,000-1,000,000	1	2	1	3	3	3	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
57	1	2	2	-	501,000-1,000,000	1	2	1	3	3	3	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
58	1	2	2	-	501,000-1,000,000	1	-	1	3	3	3	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
59	1	2	2	2	501,000-1,000,000	1	1	1	1	1	1	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
60	1	2	2	2	501,000-1,000,000	1	1	1	1	1	1	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
61	1	2	2	-	501,000-1,000,000	1	1	1	1	1	1	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
62	1	2	2	-	501,000-1,000,000	1	1	1	1	1	1	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
63	1	2	2	2	501,000-1,000,000	1	1	1	1	1	1	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
64	1	2	2	-	501,000-1,000,000	1	1	1	1	1	1	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
65	1	2	2	-	501,000-1,000,000	1	1	1	1	1	1	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	1	3
66	1	2	2	-	501,000-1,000,000	1	1	1	1	1	1	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
67	1	2	2	-	501,000-1,000,000	1	1	1	1	1	1	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
68	1	2	2	-	1,100,000-2,000,000	1	1	1	1	1	1	> 2,000,000	4	-	-	-	-	-	-	3	2	3
69	1	2	2	2	1,100,000-2,000,000	1	1	1	1	1	1	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
70	1	2	2	2	1,100,000-2,000,000	1	1	1	1	1	1	1,100,000-2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
71	1	2	2	-	1,100,000-2,000,000	1	1	1	1	1	-	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
72	1	2	2	2	501,000-1,000,000	1	1	1	1	1	1	> 2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3
73	1	2	3	3	1,100,000-2,000,000	2	2	1	2	3	3	< 500,000	3	-	-	-	-	-	-	3	4	3
74	1	2	3	3	1,100,000-2,000,000	2	2	1	2	3	3	< 500,000	3	-	-	-	-	-	-	3	3	2
75	1	2	3	3	1,100,000-2,000,000	2	2	1	2	3	3	< 500,000	3	-	-	-	-	-	-	3	3	2
76	1	2	3	3	1,100,000-2,000,000	2	2	1	2	3	3	< 500,000	3	-	-	-	-	-	-	3	3	2
77	1	2	3	3	1,500,000	2	2	1	2	3	3	< 500,000	3	-	-	-	-	-	-	3	3	2
78	1	2	3	3	1,100,000-2,000,000	2	2	1	2	3	3	< 500,000	3	-	-	-	-	-	-	3	3	2
79	1	2	3	3	1,100,000-2,000,000	2	2	1	3	3	3	1,100,000-2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	1
80	1	2	3	3	1,100,000-2,000,000	2	2	1	3	3	3	1,100,000-2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	1
81	1	2	3	3	1,600,000	1	2	1	3	3	3	< 500,000	2	-	-	-	-	-	-	3	3	2
82	1	2	3	3	1,700,000	1	2	1	3	3	3	< 500,000	2	-	-	-	-	-	-	3	3	2
83	1	2	3	3	1,500,000	1	2	1	3	3	3	< 500,000	3	-	-	-	-	-	-	3	3	1
84	1	2	3	3	1,600,000	1	2	1	3	3	3	< 500,000	3	-	-	-	-	-	-	3	3	2
85	1	2	3	3	1,450,000	1	2	1	3	3	3	< 500,000	3	-	-	-	-	-	-	3	3	2
86	1	2	3	3	1,400,000	1	2	1	3	3	3	< 500,000	3	-	-	-	-	-	-	3	3	2
87	1	2	3	3	1,500,000	1	2	1	3	3	3	< 500,000	3	-	-	-	-	-	-	3	3	1
88	1	2	3	3	1,600,000	2	2	1	3	3	3	< 500,000	3	-	-	-	-	-	-	3	3	1
89	1	2	3	3	2,400,000	1	2	1	3	3	3	< 500,000	4	-	-	-	-	-	-	3	3	2
90	1	2	3	3	1,400,000	2	2	1	3	3	3	< 500,000	2	-	-	-	-	-	-	3	3	1
91	1	2	3	3	1,300,000	1	2	1	3	3	3	< 500,000	3	-	-	-	-	-	-	3	3	1
92	1	2	3	3	1,700,000	1	2	1	3	3	3	1,100,000-2,000,000	3	-	-	-	-	-	-	3	3	1
93	1	2	3	3	1,500,000	1	2	1	3	3	3	< 500,000	2	-	-	-	-	-	-	3	3	1
94	1	2	3	3	1,600,000	1	2	1	3	3	3	< 500,000	2	-	-	-	-	-	-	3	3	1
95	1	2	3	3	1,700,000	1	2	1	3	3	3	< 500,000	3	-	-	-	-	-	-	3	3	1
96	2	1	2	3	1,400,000	2	2	1	2	3	3	1,100,000-2,000,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	2
97	1	2	3	3	1,100,000-2,000,000	2	2	1	3	3	3	< 500,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	2
98	1	2	3	3	1,700,000	1	2	1	3	3	3	< 500,000	2	-	-	-	-	-	-	3	2	2
99	1	2	3	3	2,100,000	2	2	1	3	3	3	< 500,000	2	-	-	-	-	-	-	3	3	1
100	1	2	3	3	> 2,000,000	1	2	1	3	3	3	< 500,000	4	-	-	-	-	-	-	3	3	2